

RENCANA STRATEGIS



DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

TAHUN 2025-2029

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung visi dan misi Bupati dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa untuk menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, adil dan merata diperlukan adanya proses perencanaan melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dimana Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1);

by

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan :

- a. menjabarkan Visi, Misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; dan

dy

- b. menyediakan acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah selama lima tahun ke depan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada Perangkat Daerah; dan
- b. menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD dan RKPD dalam periode tahun 2025-2029.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan berpedoman kepada RPJMD tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
 - b. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Rencana Strategis Inspektorat Daerah;
 - d. Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
 - e. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. Rencana Strategis Dinas Sosial;
 - j. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - l. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- m. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- n. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- o. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- q. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
- r. Rencana Strategis Dinas Perhubungan;
- s. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- t. Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- u. Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- v. Rencana Strategis Dinas Perikanan;
- w. Rencana Strategis Dinas Pangan;
- x. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- y. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- z. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- bb. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- dd. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis;
- ee. Rencana Strategis Kecamatan Guguk;
- ff. Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh;
- gg. Rencana Strategis Kecamatan Mungka;
- hh. Rencana Strategis Kecamatan Suliki;
- ii. Rencana Strategis Kecamatan Bukik Barisan;
- jj. Rencana Strategis Kecamatan Gunuang Omeh;
- kk. Rencana Strategis Kecamatan Luak;
- ll. Rencana Strategis Kecamatan Lareh Sago Halaban;
- mm. Rencana Strategis Kecamatan Harau;
- nn. Rencana Strategis Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
- oo. Rencana Strategis Kecamatan Akabiluru;
- pp. Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
- qq. Rencana Strategis Kecamatan Kapur IX.

- (5) Rencana Strategis Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Rencana Strategis Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (8) Rencana Strategis Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (9) Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (10) Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (11) Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (12) Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (13) Rencana Strategis Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (14) Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (15) Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (16) Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (17) Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (18) Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (19) Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (20) Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (21) Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q

tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (22) Rencana Strategis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (23) Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (24) Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (25) Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (26) Rencana Strategis Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (27) Rencana Strategis Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (28) Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (29) Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (30) Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (31) Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (32) Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ab tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (33) Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ac tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (34) Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ad tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (35) Rencana Strategis Kecamatan Guguk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ae tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (36) Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf af tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (37) Rencana Strategis Kecamatan Mungka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ag tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (38) Rencana Strategis Kecamatan Suliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ah tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (39) Rencana Strategis Kecamatan Bukik Barisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ai tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (40) Rencana Strategis Kecamatan Gunuang Omeh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (41) Rencana Strategis Kecamatan Luak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ak tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (42) Rencana Strategis Kecamatan Lareh Sago Halaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf al tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (43) Rencana Strategis Kecamatan Harau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf am tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (44) Rencana Strategis Kecamatan Situjuah Limo Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf an tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (45) Rencana Strategis Kecamatan Akabiluru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ao tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (46) Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ap tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (47) Rencana Strategis Kecamatan Kapur IX sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif serta Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (3) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 7

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perubahan rencana strategis Perangkat Daerah mempedomani perubahan RPJMD.
- (2) Apabila terdapat perubahan kelembagaan Perangkat Daerah maka rencana strategis Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



SAHMAZMAR
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2025.....NOMOR.....42

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.....	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-1
2.1.1.1 Tugas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-1
2.1.1.2 Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-6
2.1.1.3 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	II-7
2.1.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	II-8
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-22
2.1.3.1 Realisasi dan Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah	II-24
2.1.3.2 Rangkuman Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	II-28
2.1.4 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah.....	II-28
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Pelayanan	II-30
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-32
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-32
2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Perangkat Daerah	II-32
2.2.1.2 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	II-32
2.2.2 Identifikasi Isu Strategis Sesuai Lingkungan Dinamis	II-36
2.2.2.1 Isu Global yang Relevan dengan Permasalahan Perangkat Daerah	II-36
2.2.2.2 Isu Nasional yang Relevan dengan Permasalahan Perangkat Daerah	II-37

2.2.2.3 Isu Regional yang Relevan dengan Permasalahan Perangkat Daerah	I-38
2.2.2.4 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	II-44
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA.....	III-1
3.1 Tujuan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029.....	III-1
3.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota.....	III-1
3.1.2 Tujuan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.....	III-5
3.2 Sasaran Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029.....	III-6
3.3 Strategi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029.....	III-9
3.4 Arah Kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029.....	III-12
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ...	IV-1
4.1 Uraian Program.....	IV-33
4.2 Uraian Kegiatan	IV-33
4.3 Uraian Subkegiatan, Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Insentif.....	IV-36
4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-77
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	IV-80
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	IV-81
BAB V PENUTUP	V-1
5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	V-1
5.2. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra	V-2
5.3. Rencana Tindak Lanjut	V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah PNS Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota	Hal II-9
Tabel 2.2.	Jumlah Aset Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota	II-9
Tabel. 2.3	Realisasi Pelaksanaan Urusan yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-23
Tabel 2.4	Peran OPD dalam Pencapaian TPB/ SDGs di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-32
Tabel 2.5	Capaian Indikator TPB/ SDGs pada Organisasi Perangkat Daerah	II-34
Tabel 2.6	Rekomendasi Skenario Alternatif dan Rekomendasi Kabupaten Lima Puluh Kota	II-35
Tabel 2.7	Isu Strategis Perangkat Daerah	II-45
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota	III-7
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota	III-9
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota	III-12
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	IV-2
Tabel 4.2	Uraian Kegiatan PD	IV-33
Tabel 4.3	Tabel Uraian Subkegiatan, Kinerja, Indikator, dan Target 2025-2025	IV-36
Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-77
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama PD	IV-80
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci PD	IV-81

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten	I-1
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota	II-28
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD	IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

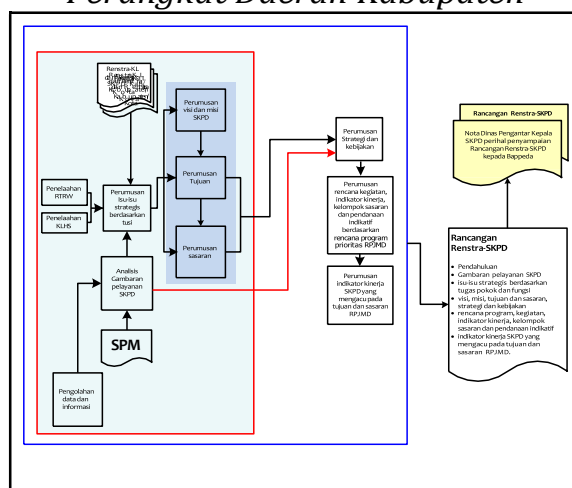
Penyusunan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana diatur UU 25/2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, sedangkan untuk sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 yang terdiri dari :

1. Pendahuluan;
2. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
3. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
4. Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
5. Penutup.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahun. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat Peraturan Perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk lima tahun mendatang.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten dapat digambarkan berikut:

Gambar 1.1 *Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten*



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi

pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);
 15. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045.
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029.
 22. Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2025 - 2029 serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebagai berikut:

- 1 Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025 - 2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah.
- 2 Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu 2025 - 2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- 3 Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahunan dalam kurun waktu 2025 - 2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan lainnya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat secara umum tentang dasar hukum pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, Struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi.

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat secara ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset.

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya.

d. Mitra Perangkat Daerah dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Memuat secara umum tentang kolaborasi dan kemitraan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat secara ringkas mengenai masalah-masalah yang dihadapi perangkat daerah dan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan Visi dan Misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

c. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

d. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

e. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
3. Sasaran jangka menengah pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1 Tujuan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2029

Sub-bab ini menjelaskan arah jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota. Tujuan tersebut dirumuskan untuk mendukung visi dan misi daerah, serta memperkuat peran dinas dalam meningkatkan daya saing sektor perdagangan, koperasi, dan UKM secara berkelanjutan.

2 Sasaran Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2029

Sub-bab ini menguraikan hasil yang lebih terukur dari setiap tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran dirancang agar dapat dijadikan acuan dalam perencanaan program dan kegiatan, serta sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan Renstra.

3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Bagian ini memaparkan pendekatan dan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh Dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi mencakup upaya peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan pelaku usaha, serta penguatan kelembagaan dan infrastruktur penunjang.

4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029

Sub-bab ini menjelaskan kebijakan-kebijakan utama yang akan diambil oleh Dinas untuk mendukung pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan. Arah kebijakan mencerminkan fokus intervensi program yang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam sektor perdagangan, koperasi, dan UKM.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program Perangkat Daerah

4.2 Uraian Kegiatan Perangkat Daerah

4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

4.5 Target keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sarana Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Pemerintah Daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , maka Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta tata kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

2.1.1.1 Tugas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan pemerintahan Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan, Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan , Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
- f. Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP).

- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas.
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan, Bidang Kemetrollogian dan Pengawasan Perdagangan , Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
- f. Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP).
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas.
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran.

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas diatas sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan.
 - b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan,kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan.
 - c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan.
 - d. Pengelolaan penyusunan dan pelaporan program.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Kepala Bidang Fasilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan.

Kepala Bidang Fasilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Fasilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas dan pembantuan yang ditugaskan kepala daerah. Dalam menjalankan tugas diatas Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Distribusi Fasilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Fasilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan.
 - c. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Fasilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan.
 - d. Pelaksanaan pembinaan pelaku usaha perdagangan dalam rangka pengembangan ekspor dan perluasan akses pasar produk ekspor.
 - e. Penyediaan data dan informasi perdagangan.
 - f. Penyediaan pembinaan kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan.
 - g. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, internasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan daerah.
 - h. Pelaksanaan pemetaan produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor.
 - i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Fasilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan.
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) Bidang Fasilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan diberikan Pimpinan.

4. Kepala Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan.
Kepala Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kemetrologian dan pengawasan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
Dalam melaksanakan tugas diatas Kepala Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Penyiapan, perumusan, penetapan kebijakan teknis di bidang kemetrologian dan pengawasan perdagangan.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kemetrologian dan pengawasan perdagangan.
 - c. Pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat ukur, Timbang, Takar dan Peralatannya (UTTP).
 - d. Pelaksanaan pengawasan UTTP, barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran.
 - e. Pelaksanaan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN).
 - f. Pelaksanaan pengawasan kegiatan di bidang perdagangan dan pengawasan barang beredar atau jasa di pasar dan tempat penyimpanan serta penegakan hukum pelanggaran di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen.
 - g. Pelaksanaan penertiban rekomendasi perizinan dan pendaftaran perusahaan.
 - h. Pelaksanaan pengawasan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
 - i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan lainnya.
5. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
Dalam melaksanakan tugas diatas Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi.

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Kelembagaan dan pengawasan Koperasi.
 - c. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat.
 - d. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat.
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi.
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan verifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.
 - g. Pelaksanaan koordinasi pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi.
 - h. Pelaksanaan koordinasi bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
 - i. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
 - a. Pelaksanaan Koordinasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas kab/kota dalam 1 (satu) Provinsi.
 - b. Pelaksanaan Koordinasi penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
 - c. Pelaksanaan koordinasi upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi.
 - d. Pelaksanaan koordinasi penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
 - e. Pelaksanaan koordinasi penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi.
 - f. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan koperasi.
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro
- Kepala Bidang Pemberdayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- Dalam melaksanakan tugas diatas Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
- a. Perumusan dan penyiapan kebijakan dan program Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi.
- c. Pengkoordinasian perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi.
- d. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri.
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi.
- f. Pengkoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya.
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi.
- i. Pengkoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil.
- j. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri.
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil.
- l. Pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK).
- m. Pengkoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah.
- n. Pengkoordinasian pengembangan kewirausahaan; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Perumusan, kebijakan, penyelenggaraan, dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan, Bidang Kemetrollogian dan Pengawasan Perdagangan, Bidang Kelembagaan

- dan Pengawasan Koperasi, dan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan dan kepegawaian dan rumah tangga dinas;
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.1.3 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

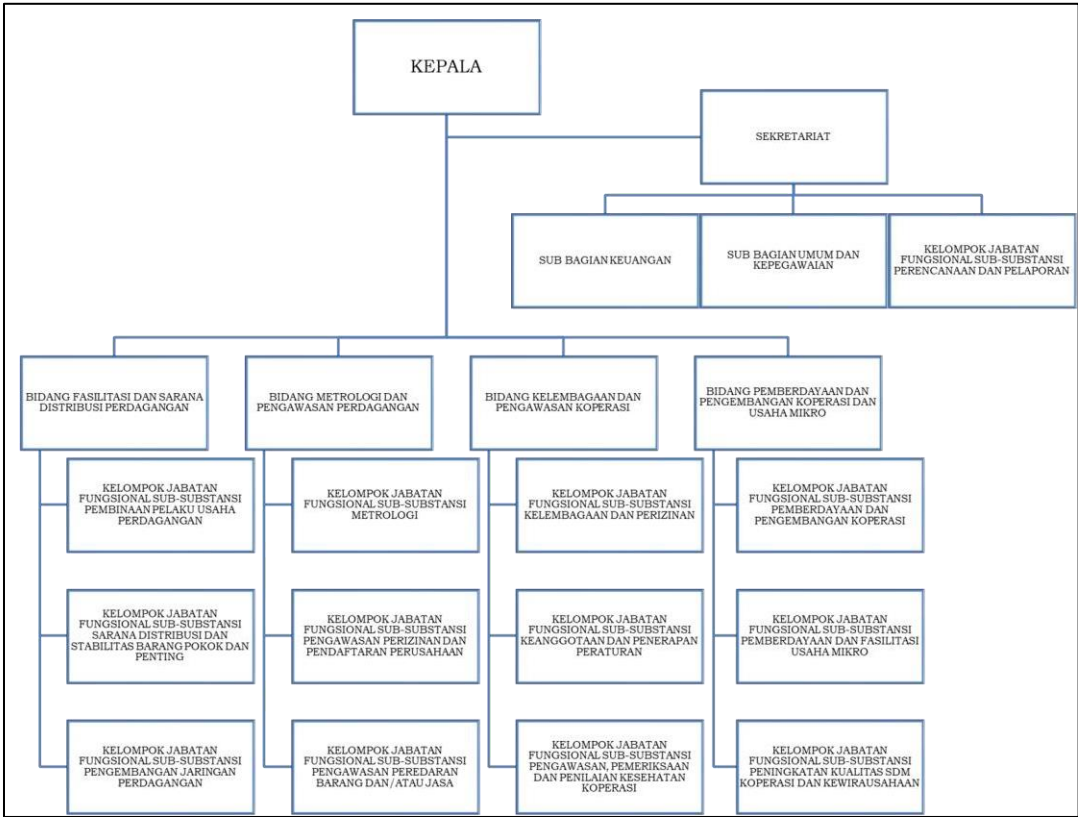
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Pelaporan.
3. Kepala Bidang Fasilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana Distribusi & Stabilitas Barang Pokok dan Penting; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Jaringan Perdagangan.
4. Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Metrologi;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Perizinan & Pendaftaran Perusahaan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Peredaran Barang / Jasa.
5. Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dan Perizinan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan

- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi.
- 6. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi & Usaha mikro, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan & Pengembangan koperasi;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan & Fasilitasi Usaha Mikro; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi & Kewirausahaan.

Untuk lebih jelas dari Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada skema di bawah ini.

Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



2.1.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati. Sampai dengan Tahun 2024 terdapat 8650 Unit Usaha yang teregistrasi di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota, yang terdiri dari Usaha

Kuliner, Usaha Fashion, Usaha Bidang Otomotif, Usaha Bidang Teknologi Internet, Usaha Bidang Agribisnis, Usaha Bidang Pendidikan dan Usaha UMKM Bidang lainnya. Sedangkan Sumber daya yang dimiliki Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi Sumber Daya Manusia serta aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang dipergunakan untuk keperluan dan atau menunjang berlangsungnya Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 2.1. Jumlah PNS Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kepala Sub Bagian	2
5	Kelompok Jabatan Fungsional	31
5	Staf	19
Jumlah :		58

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM Lima Puluh Kota

Tabel 2.2. Jumlah Aset Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota

NOM OR	SPEKIFIKASI BARANG	ASAL / CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG			
NO. URUT	NAMA / JENIS BARANG			B	R R	R B	HARGA
1	2	3	4	5			6
	1. TANAH						
1	Tanah Bangunan Rumah	APBN	1981	1	-	-	1.500.000
2	Tanah bangunan Tempat kerja	APBN	1981	1	-	-	25.704.000
3	Tanah bangunan Tempat kerja	APBN	1981	1	-	-	213.750.000
	Sub jumlah						240.954.000
	2. PERALATAN DAN MESIN						
	A. ALAT BESAR						
	- Alat Bantu						
4	Pompa Air	APBD	2016	1			655.000
	Sub jumlah						655.000
	B. ALAT ANGKUTAN						
5	Kendaraan roda 4	APBD	2002	1	-	-	113.000.000
6	Kendaraan roda 4	APBD	2008	1	-	-	189.948.000
7	Kendaraan roda 4	APBD	2013	1	-	-	157.310.000

NOM OR	SPESIFIKASI BARANG	ASAL / CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG			HARGA
NO. URUT	NAMA / JENIS BARANG			B	R R	R B	
1	2	3	4	5			6
8	Kendaraan roda 4	APBD	2014	1	-	-	266.545.000
9	Kendaraan roda 4	APBD	2019	1	-	-	575.604.000
		Sub Jumlah					1.302.407.000
10	Kendaraan Dinas Roda 2	APBD	2008	2	-	-	30.000.000
11	Kendaraan Dinas Roda 2	APBD	2009	3	-	-	55.545.000
12	Kendaraan Dinas Roda 2	APBD	2009	3	-	-	44.274.000
13	Kendaraan Dinas Roda 2	APBD	2011	1	-	-	14.553.000
14	Kendaraan Dinas Roda 2	APBD	2012	4	-	-	55.036.000
15	Kendaraan Dinas Roda 2	APBD	2013	1	-	-	16.236.125
16	Kendaraan Dinas Roda 2	APBD	2017	4	-	-	66.670.000
17	Kendaraan Dinas Roda 2	APBD	2017	1	-	-	46.550.000
18	Kendaraan Dinas Roda 2	APBD	2017	1	-	-	46.550.000
19	Kendaraan Dinas Roda 2	APBD	2019	1	-	-	39.065.000
20	Kendaraan Dinas Roda 2	APBD	2019	1	-	-	32.310.000
21	Kendaraan Dinas Roda 2	APBD	2019	1	-	-	27.120.000
22	Kendaraan Dinas Roda 2	APBD	2019	1	-	-	24.270.000
		Sub Jumlah					498.179.125
	Jumlah Alat Angkutan						1.800.586.125
	C. ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR						
	a. ALAT UKUR						
	- Alat Ukur Universal						
23	Lemping tangki pengait 10 kg	APBD	2018	1	-	-	3.762.000
	- Alat Ukur / Pembanding						
24	Tool Set	APBD	2019	1	-	-	13.685.000
25	Tang Segel	APBD	2019	3	-	-	6.900.000
	- Alat Ukur Lain-Lain						
26	Bejana ukur	APBD	2011	1	-	-	2.750.000
27	Beja ukur standar Kap 5 liter + Landasan Bejana	APBD	2018	1	-	-	7.260.000
28	Bejana ukur standar Kap. 10 liter + landasan bejana	APBD	2018	1	-	-	8.514.000
29	Bejana ukur standar Kap. 20 liter + landasan bejana	APBD	2018	1	-	-	12.940.000
30	Alas Beja Ukur	APBD	2011	1	-	-	750.000
31	Alat uji meteran kayu kap.1 m DB 1 mm	APBD	2018	1	-	-	6.131.600
32	Vernier Caliper 300 mm	APBD	2018	1	-	-	11.290.000
33	Lemping 5 kg	APBD	2018	1	-	-	3.643.200
34	Lemping 10 kg	APBD	2018	1	-	-	4.798.310
35	Lemping 10 kg	APBD	2018	2	-	-	9.596.620
36	Lemping 20 kg	APBD	2018	1	-	-	6.087.260
37	Lemping 20 kg	APBD	2018	1	-	-	6.087.260
38	Kaki 3 pengantung Dacin + rantai + kotak besi	APBD	2018	1	-	-	3.965.905
39	Thermometer digital Kap DB 0,1, C	APBD	2018	1	-	-	3.921.000
40	Stop watch daya baca 0,01 s	APBD	2019	1	-	-	2.181.550
41	Landasan Cap Tanda Tera	APBD	2019	1	-	-	13.455.000
42	Dehumidifier (1liter per jam pada 32 0C dan 80%RH)	APBD	2019	1	-	-	17.828.450

NOM OR	SPESIFIKASI BARANG	ASAL / CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG			HARGA
NO. URUT	NAMA / JENIS BARANG			B	R R	R B	
1	2	3	4	5			6
	- Alat Timbangan / Biara						
43	Timbangan Gas/Sentisimal	APBD	2011	1	-	-	2.500.000
44	Timbangan Digital	APBD	2008	2	-	-	4.900.000
45	TE Presisi Kap. 6.200 g untuk M1, M2, M3 db 0,01 g	APBD	2019	1	-	-	55.200.000
46	TE Presisi Kap. 32.200 g untuk M1, M2, M3 db 0,1 g	APBD	2019	1	-	-	103.960.000
47	TE Presisi Kap. 220 g untuk M1, M2, M3 db 0,1 mg	APBD	2019	1	-	-	35.535.000
48	Thrmohygrometer (RH20 ^o /æ/d100%, m-100 ^o Cs/d60 ^o C	APBD	2019	1	-	-	2.990.000
49	Thermometer Air Raksa -10(0) ^o C s/d 110(50) ^o C	APBD	2019	1	-	-	1.725.000
50	Barometer (710 - 800 mm Hg)	APBD	2019	1	-	-	3.105.000
	- Anak Timbangan / Biara						
51	Bidur 20 kg (Anak timbangan kelas M2)	APBD	2018	25	-	-	19.250.000
					-	-	
52	Anak Timbangan kg	APBD	2011	1	-	-	3.000.000
53	Anak Timbangan gram	APBD	2011	1	-	-	2.000.000
54	Anak timbangan kelas F2 (stainless steel) 1 mg - 1 kg	APBD	2018	1	-	-	10.474.200
					-	-	
55	Anak timbangan kelas F2 (stainless steel) 2 kg	APBD	2018	1	-	-	2.541.000
					-	-	
56	Anak timbangan kelas F2 (stainless steel) 5 kg	APBD	2018	1	-	-	6.309.600
					-	-	
57	Anak timbangan kelas F2 (stainless steel) 10 kg	APBD	2018	1	-	-	10.032.000
58	Anak timbangan kelas M2 (Remidi) 1 gram-1 kg	APBD	2018	1	-	-	5.092.045
					-	-	
59	AT Kelas M1 Kap. 1 mg - 1 kg ((25 buah)	APBD	2019	1	-	-	9.890.000
60	AT Kelas M1 Kap. 2 kg (stainless steel)	APBD	2019	1	-	-	3.105.000
61	AT Kelas M1 Kap. 5 kg (stainless steel)	APBD	2019	1	-	-	5.117.500
62	AT Kelas M1 Kap. 10 kg (stainless Steel)	APBD	2019	1	-	-	7.245.000
63	AT Kelas M1 Kap. 20 kg (stainless steel)	APBD	2019	1	-	-	11.040.000
64	AT Kelas M2 Kap. 1 mg - 1 kg (25 buah)	APBD	2019	1	-	-	8.970.000
65	AT Kelas M2 Kap. 1 kg (stainlees steel)	APBD	2019	2	-	-	2.875.000
66	AT Kelas M2 Kap. 2 kg (stainlees steel)	APBD	2019	2	-	-	5.175.000
67	AT Kelas M2 Kap. 5 kg (stailees steel)	APBD	2019	2	-	-	9.775.000
68	AT Kelas M2 Kap. 10 kg (stailees steel)	APBD	2019	2	-	-	12.362.500
69	Anak timbangan Remidi Dacin Logam TM/CB (kuningan)	APBD	2019	2	-	-	8.970.000
70	AT Kelas M2 Kap. 20 kg (stailees steel)	APBD	2019	2	-	-	20.470.000
	Sub Jumlah						519.156.000
	EKTRA KOMPETABLE 2019 :						
71	Alat uji timbangan Kelas M2 Kap.20 kg (Bidur)(besi cor massive)	APBD	2019	200	-	-	143.750.000

NOM OR	SPESIFIKASI BARANG	ASAL / CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELI AN	KEADAAN BARANG			HARGA
NO. URUT	NAMA / JENIS BARANG						
				B	R R	R B	
1	2	3	4	5			6
	Sub Jumlah						662.906.000
	D. ALAT PERTANIAN						
	E. ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA						
	a. ALAT KANTOR						
	- Mesin Ketik						
72	Mesin ketik 13 MC (Manual Standar)	APBD	2009	-	-	1	2.090.000
73	Mesin Ketik (Manual Standar)	APBD	2009	1	-	-	4.960.000
74	Mesin Ketik (Manual Langewagon)	APBD	2008	-	1	-	1.993.600
75	Mesin Ketik (Manual Langewagon)	APBD	2008	-	1	-	1.993.600
76	Mesin Ketik (Manual Langewagon)	APBD	2008	1	-	-	1.993.600
77	Mesin Ketik (Manual Langewagon)	APBD	2008	-	1	-	1.993.600
78	Mesin Ketik (Manual Langewagon)	APBD	2014	-	1	-	2.000.000
	- Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor						
79	Lemari arsip/besi	APBD	2015	1	-	-	4.136.000
80	Lemari locker/Lemari besi	APBD	2019	6	-	-	11.998.800
81	Lemari Arsip	APBD	2019	4	-	-	9.741.000
82	Lemari Kayu Kaca	APBD	1998	1	-	-	1.400.000
83	Lemari Kayu Kaca	APBD	1998	1	-	-	850.000
84	Lemari Kayu	APBN	2000	-	1	-	1.400.000
85	Lemari Kayu	APBN	2000	1	-	-	700.000
86	Lemari Kayu	APBD	2008	2	-	-	4.000.000
87	Lemari Kayu	APBD	2008	2	-	-	4.000.000
88	Lemari Kayu	APBD	2008	-	1	-	1.300.000
89	Lemari	APBD	2009	-	1		3.000.000
90	Lemari	APBD	2011	1	-	-	2.230.000
91	Lemari	APBD	2011	2	-	-	4.000.000
92	Lemari	APBD	2011	1	-	-	750.000
93	Lemari	APBD	2012	2	-	-	2.500.000
94	Lemari	APBD	2012	1	-	-	900.000
95	Lemari	APBD	2012	1	-	-	4.200.000
96	Lemari	APBD	2012	1	-	-	3.800.000
97	Lemari	APBD	2012	3	-	-	7.500.000
98	Lemari	APBD	2013	2	-	-	4.000.000
99	Lemari arsip	APBD	2017	2	-	-	5.000.000
100	Lemari Pajang/Conter Display Tp A	APBD	2018	1	-	-	48.575.000
101	Filling Kabinet	APBD	2006	-	1	-	1.500.000
102	Filling Kabinet	APBD	2008	7	-	-	20.400.000
103	Filling Kabinet	APBD	2015	4	-	-	8.258.000
104	Filling Kabinet	APBD	2018	4	-	-	10.000.000
105	Brankas	APBD	2018	1	-	1	18.500.000
106	Etalase/lemari kaca	APBD	2012	1	-	-	4.080.500
107	Lemari	APBD	2015	2	-	-	11.594.000
108	Lemari Arsip	APBD	2018	6	-	-	12.000.000
109	Lemari Arsip	APBD	2018	3	-	-	6.000.000
110	Lemari Arsip	APBD	2019	2	-	-	3.300.000

NOM OR	SPESIFIKASI BARANG	ASAL / CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELI AN	KEADAAN BARANG			HARGA
NO. URUT	NAMA / JENIS BARANG						
				B	R R	R B	
1	2	3	4	5			6
111	Lemari Arsip	APBD	2019	5	-	-	7.785.000
	- Alat Kantor Lainnya						
112	CCTV	APBD	2015	1	-	-	29.861.000
113	CCTV	APBD	2018	1	-	-	29.612.000
114	CCTV	APBD	2019	1	-	-	33.047.000
115	Papan data/Visual	APBD	2014	1	-	-	15.000.000
116	Papan struktur organisasi		2016	1	-	-	18.500.000
117	Projector	APBD	2017	1	-	-	18.697.360
118	Projector	APBD	2017	1	-	-	19.800.000
119	Layar Invokus	APBD	2008	1	-	-	4.050.000
120	Papan Nama Instansi (Kantor)	APBD	2011	-	-	1	700.000
121	Papan Nama Instansi (BPSK)	APBD	2016	1	-	-	2.000.000
122	Bacwal mudul lurus (Alat kantor lainnya)	APBD	2012	-	2	-	15.790.000
123	Bacwal mudul lengkung (Alat kantor lainnya)	APBD	2012	-	2	-	15.680.000
124	Baliho	APBD	2013	3	-	-	39.990.000
125	Banner elektronik	APBD	2016	-	1	-	3.000.000
	b. ALAT RUMAH TANGGA						
	- Meubelair						
126	Meja Sidang (Meja kerja kayu)	APBD	2019	2	-	-	8.337.500
127	Kursi tunggu	APBD	2015	3	-	-	9.126.000
128	Meja Rapat	APBN	2000	6		-	2.400.000
129	Meja Rapat	APBD	2015	1	-	-	5.250.000
130	Meja Rapat	APBD	2019	10	-	-	13.474.700
131	Meja Resepsionis	APBD	2018	2	-	-	32.780.000
132	Meja Resepsionis	APBD	2019	1	-	-	52.275.000
133	Kursi rapat	APBD	2015	30	-	-	18.285.000
134	Kursi rapat	APBD	2017	60	-	-	30.000.000
135	Kursi Tamu	APBN	2000	1	-	-	1.000.000
136	Kursi Tamu	APBD	2003	1	-	-	1.200.000
137	Kursi Tamu	APBD	2006	1	-	-	1.600.000
138	Kursi Tamu	APBD	2008	1	-	-	1.900.000
139	Kursi Tamu	APBD	2008	1	-	-	3.000.000
140	Kursi Tamu	APBD	2011	1	-	-	1.420.000
141	Kursi Tamu	APBD	2011	1	-	-	2.000.000
142	Kursi Tamu	APBD	2012	1	-	-	2.500.000
143	Kursi Tamu	APBD	2013	1	-	-	7.000.000
144	Kursi Tamu	APBD	2015	2	-	-	15.983.000
145	Kursi Tamu	APBD	2017	2	-	-	15.000.000
146	Kursi Tamu	APBD	2018	1	-	-	9.800.000
147	Kursi Tamu	APBD	2019	1	-	-	12.574.000
148	Kursi putar	APBD	2008	11	-	-	3.850.000
149	Kursi putar	APBD	2017	16	-	-	16.130.000
150	Meja Komputer	APBD	2002	1	-	-	400.000
151	Meja Komputer	APBD	2018	3	-	-	2.490.000
	- Alat Pembersih						

NOM OR	SPESIFIKASI BARANG	ASAL / CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELI AN	KEADAAN BARANG			HARGA
NO. URUT	NAMA / JENIS BARANG			B	R R	R B	
1	2	3	4	5			6
152	Vacum cleaner	APBD	2017	1	-	1	1.700.000
153	Vacum cleaner	APBD	2018	1	-	1	3.500.000
154	Mesin Potong Rumput	APBD	2016	1	-	-	2.127.500
155	Mesin Potong Rumput	APBD	2016	1	-	-	4.305.000
	- Alat Pendingin						
156	K u l k a s	APBD	2013	2	-	-	4.200.000
157	K u l k a s	APBD	2014	1	-	-	2.500.000
158	A C	APBD	2012	1	-	-	4.000.000
159	A C	APBD	2013	6	-	-	21.000.000
160	A C	APBD	2016	4	-	-	16.000.000
161	A C	APBD	2017	3	-	-	19.500.000
162	A C	APBD	2018	4	-	-	16.400.000
163	A C	APBD	2019	4	-	-	15.573.000
164	AC	APBD	2019	2	-	-	19.837.500
165	Kipas Angin	APBD	2006	1	-	-	450.000
166	Kipas Angin	APBD	2011	2	-	-	1.000.000
	- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)						
167	Radio tape	APBD	2009	1	-	-	1.017.000
168	Televisi	APBD	2009	-	-	1	1.500.000
169	Televisi	APBD	2011	1	-	-	5.000.000
170	Televisi	APBD	2013	1	-	-	5.000.000
171	Televisi	APBD	2014	1	-	-	4.000.000
172	Televisi	APBD	2017	1	-	-	3.999.000
173	Televisi	APBD	2017	1	-	-	3.410.000
174	Televisi	APBD	2019	1	-	-	6.575.000
175	Loudspeaker	APBD	2009	1	-	-	900.000
176	Sound System	APBD	2014	1	-	-	10.000.000
177	Mixer Soundcraf 8 canel	APBD	2019	1	-	-	2.878.800
178	Speaker portable	APBD	2019	2	-	-	5.685.600
179	Camera	APBD	2008	-	-	2	5.950.000
180	Camera	APBD	2012	1	-	-	1.500.000
181	Camera	APBD	2013	1	-	-	7.000.000
182	Camera	APBD	2013	1	-	-	7.000.000
183	Camera	APBD	2014	1	-	-	8.000.000
184	Karpet	APBD	2012	1	-	-	10.000.000
185	Kain gorden	APBD	2012	1	-	-	10.000.000
186	Billboard/papan reklame	APBD	2017	3	-	-	121.755.000
187	Rak bulat/Conter Display Type B	APBD	2018	1	-	-	15.905.000
188	Lemari rak/Conter Dispaly Type C	APBD	2018	1	-	-	20.625.000
189	Lemari rak/Conter Dispaly Type D	APBD	2018	1	-	-	33.055.000
190	Lemari rak/Conter Dispaly Type E	APBD	2018	1	-	-	15.400.000
191	Fik furniture resepsionis	APBD	2018	1	-	-	27.940.000
192	Rak Penyimpanan resepsionis	APBD	2018	1	-	-	4.345.000
193	Wastafel	APBD	2020	2	-	-	2.174.000
194	Tangki Air	APBD	2020	1	-	-	1.700.000

NOM OR	SPESIFIKASI BARANG	ASAL / CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG			HARGA
NO. URUT	NAMA / JENIS BARANG			B	R R	R B	
1	2	3	4	5			6
	- Alat Pemadam Kebakaran						
195	Racun api (Alat pembantu kebakaran)	APBD	2016	4	-	-	4.472.726
	c. MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT						
	- Meja Kerja Pejabat						
196	Meja kerja pejabat eselon II	APBD	2007	1	-	-	4.000.000
197	Meja kerja pejabat eselon II	APBD	2008	1	-	-	1.300.000
198	Meja kerja pejabat eselon II	APBD	2018	1	-	-	5.000.000
199	Meja Eselon III	APBD	2006	1	-	-	600.000
200	Meja Eselon III	APBD	2018	1	-	-	5.000.000
201	Meja Eselon III	APBD	2018	5	-	-	10.000.000
202	Meja Eselon IV	APBD	2018	1	-	-	1.150.000
203	Meja Staf	APBN	1992	-	-	1	325.000
204	Meja Staf	APBN	1995	10	-	-	3.684.000
205	Meja Staf	APBN	2001	2	-	-	750.000
206	Meja Staf	APBD	2007	1		-	700.000
207	Meja Staf	APBD	2008	5	-	-	3.000.000
208	Meja Staf	APBD	2008	12	-	-	9.600.000
209	Meja Biro/staf	APBD	2008	5	-	-	7.500.000
210	Meja biro/staf	APBD	2009	2	-	-	2.500.000
211	Meja biro/staf	APBD	2017	8	-	-	20.000.000
212	Meja 1/2 biro /staf	APBD	2017	16	-	-	24.350.000
	- Kursi Kerja Pejabat						
213	Kursi Eselon II	APBD	2008	1	-	-	790.000
214	Kursi Eselon II	APBD	2008	1	-	-	750.000
215	Kursi Eselon II	APBD	2018	1	-	-	3.500.000
216	Kursi Eselon III	APBD	2003	-	-	1	750.000
217	Kursi Eselon III	APBD	2008	3	-	-	2.370.000
218	Kursi Eselon III	APBD	2014	-	-	2	2.200.000
219	Kursi Eselon III	APBD	2017	6	-	-	10.515.000
220	Kursi Eselon III	APBD	2018	5	-	-	8.750.000
221	Kursi Staf / eselon IV	APBD	2018	2	-	-	2.300.000
222	Kursi Staf	APBD	2014	17	-	-	8.500.000
223	Kursi Staf /putar	APBD	2015	25	-	-	17.467.000
224	Kursi Staf	APBD	2017	16	-	-	8.000.000
225	Kursi bulat tinggi	APBD	2018	2	-	-	1.600.000
	- Lemari dan Arsip Pejabat						
226	Lemari Pajang	APBD	2018	1	-	-	5.000.000
227	Lemari gantung Ukuran 3,10	APBD	2018	1	-	-	5.580.000
228	Lemari gantung Ukuran 3,70	APBD	2018	1	-	-	6.660.000
229	Lemari gantung Ukuran 1,85	APBD	2018	1	-	-	3.330.000
230	Lemari gantung Ukuran 3,68	APBD	2018	1	-	-	6.624.000
	SUB JUMLAH						1.434.950.386
	EKTRA KOMPETABLE						

NOM OR	SPEKIFIKASI BARANG	ASAL / CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG			HARGA
NO. URUT	NAMA / JENIS BARANG			B	R R	R B	
1	2	3	4	5			6
	Ektra Kompetable 2017						
231	Papan Visull/Wihte Board	APBN	1998	1	-	-	150.000
232	Papan Visull/White Board	APBN	1998	1	-	-	150.000
233	Kursi Plastiki/ Rapat	APBN	2000	13	-	-	650.000
234	Kursi Plastik	APBD	2006	10	-	-	300.000
235	Meja Komputer	APBD	2005	2	-	-	500.000
236	Meja Komputer	APBD	2007	1	-	-	250.000
237	Jam dinding	APBD	2000	1	-	-	200.000
238	Kipas Angin	APBD	2006	1	-	-	200.000
239	Kipas Angin	APBD	2007	2	-	-	450.000
240	Kipas Angin	APBD	2011	1	-	-	275.000
241	Meja Staf	APBN	1983	1	-	-	150.000
242	Meja Staf	APBN	1989	2	-	-	470.000
243	Meja Staf	APBN	1994	2	-	-	590.000
244	Meja Staf	APBN	1996	5	-	1	990.000
245	Meja Staf	APBN	1996	1	-	-	185.000
246	MejaStaf	APBD	2006	1	-	-	200.000
247	Meja Staf	APBD	2006	8	-	-	1.600.000
248	Kursi Staf	APBN	1989	5	-	-	500.000
249	Kursi Staf	APBN	1989	-	-	2	300.000
250	Kursi Staf	APBN	1989	1	-	-	150.000
251	Kursi Staf	APBN	1989	1	-	-	150.000
252	Kursi Staf	APBN	1998	2	-	-	250.000
253	Kursi Staf	APBD	2007	1	-	-	200.000
	Jumlah ekstra kompetable 2017						8.860.000
	Ektra kompetable 2018						
254	Blender	APBD	2013	1	-	-	300.000
255	Kursi bulat pendek	APBD	2018	4	-	-	1.560.000
256	Kursi bulat pendek	APBD	2018	3	-	-	1.170.000
	Jumlah ekstra kompetable 2018						3.030.000
	Ektra kompetable 2019 :						
257	Kursi Kerja	APBD	2019	10	-	-	6.440.000
258	Kursi Staf	APBD	2019	5	-	-	3.695.030
259	Kursi rapat	APBD	2019	15	-	-	6.377.970
260	Stand speaker	APBD	2019	2	-	-	498.800
	Jumlah 2019						17.011.800
	Ektra kompetable 2022 :						
261	Meja Portable	APBD	2022	40	-	-	16.014.760
	Jumlah ekstra kompetable 2022						16.014.760
	Jumlah Alat Kantor & Rumah Tangga						1.479.866.946
	F. ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN						
	PEMANCAR						
	a. ALAT STUDIO						
	- Peralatan Studio Audio						
262	DVD Player	APBD	2011	1	-	-	375.000

NOM OR	SPESIFIKASI BARANG	ASAL / CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG			HARGA
NO. URUT	NAMA / JENIS BARANG			B	R R	R B	
1	2	3	4	5			6
263	DVD Player	APBD	2009	1	-	-	440.000
264	Wireless Mic	APBD	2018	1	-	-	4.350.000
265	Mic ropon	APBD	2019	1	-	-	1.611.200
266	Micripon HQ Pro 9	APBD	2019	1	-	-	897.600
	- Peralatan Studio Video dan Film						
267	Camera Electronic	APBD	2016	1	-	-	10.455.000
268	Camera Electronic	APBD	2017	1	-	-	6.961.570
	b. ALAT KOMUNIKASI						
	- Alat Komunikasi Telephone						
269	Telephone Mobile (Aipon)	APBD	2012	1	-	-	9.783.000
270	Pesawat Faksimil	APBD	2000	1	-	-	365.000
	- Alat Komunikasi Sosial						
271	Wireless PA Amplifair multi	APBD	2008	1	-	-	2.950.000
272	Wireless/Mic	APBD	2009	1	-	-	1.100.000
273	Bilboard	APBD	2012	1	-	-	14.805.000
	c. PERALATAN PEMANCAR						
	- Peralatan Antena SHF / Parabola						
274	Parabola (Antene SHF Portable)	APBD	2017	1	-	-	930.000
	- Sumber Tenaga						
275	Ginset	APBD	2011	1	-	-	4.305.000
276	Ginset	APBD	2017	1	-	-	200.475.000
	Sub Jumlah						259.803.370
	EKTRA KOMPETABLE						
277	Pesawat Telepon	APBD		1	-	-	71.000
278	Stand Mic/Tiang Mic	APBD	2018	1	-	-	300.000
	Jumlah Ektra Kompetable						371.000
	Jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar						260.174.370
	G. ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN						
	EKTRA KOMPETABLE 2020 :						
279	Termogun	APBD	2020	2	-	-	1.300.000
	Sub Jumlah						1.300.000
	H. ALAT LABORATORIUM						
	I. ALAT PERSENJATAAN						
	J. KOMPUTER						
	a. KOMPUTER UNIT						
	- Personal Komputer						
280	Komputer	APBD	2007	-	-	1	12.400.000
281	Komputer	APBD	2007	1	-	-	11.900.000
282	Komputer	APBD	2007	-	-	1	9.702.500
283	Komputer	APBD	2008	-	-	1	8.630.000
284	Komputer	APBD	2008	-	-	1	8.630.000

NOM OR	SPESIFIKASI BARANG	ASAL / CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELI AN	KEADAAN BARANG			HARGA
NO. URUT	NAMA / JENIS BARANG						
				B	R R	R B	
1	2	3	4	5			6
285	Komputer	APBD	2008	-	-	1	8.630.000
286	Komputer	APBD	2008	1	-	-	7.500.000
287	Komputer PC	APBD	2009	1			9.950.000
288	Komputer	APBD	2011	1	-	1	8.257.000
289	Komputer	APBD	2011	1	-		8.257.000
290	Komputer	APBD	2011	1	-		8.257.000
291	Komputer	APBD	2012	6	-	-	33.000.000
292	Komputer	APBD	2015	3	-	-	33.135.000
293	Komputer	APBD	2017	3	-	-	44.160.270
294	Komputer	APBD	2017	1	-	-	12.000.000
295	Komputer	APBD	2018	1	-	-	15.150.000
296	Komputer	APBD	2018	1	-	-	14.250.000
297	Komputer	APBD	2019	1	-	-	15.286.000
298	Komputer	APBD	2019	1	-	-	15.286.000
299	Komputer PC	APBD	2022	1	-	-	12.462.190
300	Komputer	APBD	2024	1	-	-	10.190.200
301	Laptop	APBD	2007	1	-	-	15.000.000
302	Laptop	APBD	2008	-	-	1	14.000.000
303	Laptop	APBD	2008	-	-	2	27.060.000
304	Laptop	APBD	2008	-	-	2	27.060.000
305	Laptop	APBD	2009	-	-	1	14.850.000
306	Laptop	APBD	2012	1	-	-	8.000.000
307	Laptop	APBD	2012	1	-	-	7.500.000
308	Laptop	APBD	2012	-	1	-	7.500.000
309	Laptop	APBD	2012	-	1	-	7.500.000
310	Laptop	APBD	2012	1	-	-	7.500.000
311	Laptop	APBD	2013	1	-	-	6.000.000
312	Laptop	APBD	2014	1	-	-	5.000.000
313	Laptop	APBD	2015	3	-	-	41.316.000
314	Laptop	APBD	2015	1	-	-	7.947.000
315	Laptop	APBD	2017	1	-	-	9.100.000
316	Laptop	APBD	2017	2	-	-	18.200.000
317	Laptop	APBD	2018	3	-	-	30.300.000
318	Laptop	APBD	2018	1	-	-	7.500.000
319	Laptop	APBD	2018	2	-	-	15.900.000
320	Laptop	APBD	2019	1	-	-	10.092.500
321	Laptop	APBD	2019	1	-	-	9.987.500
322	Laptop	APBD	2020	1	-	-	18.000.000
323	Laptop	APBD	2020	1	-	-	18.000.000
324	Laptop	APBD	2021	1	-	-	19.300.000
325	Laptop	APBD	2021	1	-	-	19.999.000
326	Laptop	APBD	2021	1	-	-	11.000.000
327	Laptop	APBD	2021	1	-	-	11.000.000
328	Laptop	APBD	2021	1	-	-	16.193.000
329	Laptop	APBD	2022	1	-	-	9.984.500
330	Notebook	APBD	2011	-	-	1	4.000.000
331	Notebook	APBD	2017	2	-	-	19.619.160

NOM OR	SPEKIFIKASI BARANG	ASAL / CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG			HARGA
NO. URUT	NAMA / JENIS BARANG						
B	R R			R B			
1	2	3	4	5			6
	b. PERALATAN KOMPUTER						
	- Peralatan Personal Komputer						
332	Printer	APBD	2015	2	-	-	16.160.000
333	Printer	APBD	2020	1	-	-	3.600.000
334	Printer HP	APBD	2011	-	-	1	600.000
335	Printer Canon	APBD	2011	1	-	-	600.000
336	Printer Canon	APBD	2011	-	-	1	600.000
337	Printer Canon	APBD	2011	2	-	-	1.200.000
338	Printer Canon	APBD	2011	-	-	1	617.300
339	Printer	APBD	2012	2	-	-	4.000.000
340	Printer	APBD	2013	-	-	1	1.000.000
341	Printer	APBD	2013	-	-	2	1.600.000
342	Printer	APBD	2013	-	-	1	1.400.000
343	Printer	APBD	2014	-	-	2	2.400.000
344	Printer	APBD	2014	-	-	1	1.100.000
345	Printer	APBD	2015	-	-	1	8.080.000
346	Printer	APBD	2016	1	-	-	1.500.000
347	Printer	APBD	2016	1	-	-	1.338.000
348	Printer	APBD	2017	1	-	-	6.484.040
349	Printer	APBD	2017	1	-	-	8.436.430
350	Printer	APBD	2017	1	-	-	9.748.460
351	Printer	APBD	2017	1	-	-	2.300.000
352	Printer	APBD	2018	4	-	-	6.000.000
353	Printer	APBD	2018	1	-	-	2.000.000
354	Printer	APBD	2018	1	-	-	1.500.000
355	Printer	APBD	2019	1	-	-	2.500.000
356	Printer	APBD	2019	2	-	-	3.804.150
357	Printer	APBD	2020	1	-	-	4.525.000
358	Printer Canon	APBD	2020	1	-	-	1.475.000
359	Printer	APBD	2021	1	-	-	3.898.000
360	Printer	APBD	2021	1	-	-	3.898.000
361	Printer	APBD	2021	1	-	-	3.898.000
362	Printer	APBD	2021	1	-	-	3.898.000
363	Printer	APBD	2021	1	-	-	3.898.000
364	Printer	APBD	2022	1	-	-	3.479.750
365	Printer	APBD	2024	1	-	-	3.500.000
366	Printer	APBD	2024	1	-	-	850.000
367	UPS (Peralatan personal komputer lainnya)	APBD	2011	-	-	2	1.928.300
368	UPS	APBD	2013	-	-	1	1.000.000
369	UPS	APBD	2013	-	-	2	600.000
370	UPS	APBD	2014	-	-	1	662.750
371	UPS	APBD	2015	1	-	-	3.830.000
372	UPS	APBD	2015	1	-	-	3.830.000
373	UPS	APBD	2015	-	-	1	3.830.000
374	UPS	APBD	2018	5	-	-	7.500.000
375	UPS	APBD	2019	4	-	-	6.566.000
376	Eksternal Harddisk	APBD	2021	1	-	-	1.039.000
	SUB JUMLAH						904.116.000

NOM OR	SPESIFIKASI BARANG	ASAL / CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG			HARGA
NO. URUT	NAMA / JENIS BARANG			B	R R	R B	
1	2	3	4	5			6
	JUMLAH PERALATAN DAN MESIN						5.109.604.441
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN						
377	Bangunan Gedung Tempat Kerja	APBN	1981	1	-	-	40.145.000
378	Bangunan Gedung Tempat Kerja	APBN	1986	1	-	-	61.510.000
379	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	APBN	1981	1	-	-	6.400.000
380	Bangunan Gudang Untuk RSG	APBD	2014	1	-	-	4.940.536.000
381	Terali pengaman Gudang RSG	APBD	2016	1	-	-	4.700.000
382	Terali pengaman Gudang RSG	APBD	2017	1	-	-	8.800.000
383	Bangunan Gedung Tempat Kerja	APBD	2014	1	-	-	4.574.290.000
384	Penyempurnaan Hal. Dinas	APBD	2015	1	-	-	67.950.000
385	Tangga gedung	APBD	2016	1	-	-	7.000.000
386	Halaman parkir I	APBD	2016	1	-	-	162.925.000
387	Halaman parkir II	APBD	2017	1	-	-	167.305.000
388	Rehab dan pengecatan gedung	APBD	2019	1	-	-	32.557.500
389	Halaman parkir III	APBD	2018	1	-	-	80.282.000
390	Rumah ginset	APBD	2018	1	-	-	30.390.000
391	Gapura/Gerbang	APBD	2018	1	-	-	81.064.000
392	Bangunan Rumah digital	APBD	2019	1	-	-	167.314.400
393	Kios Ps. Dangung-Dangung	Pembelian	1980	1	-	-	133.646.000
394	Los Mini + Los Kayu Ps. Dangung-Dangung	Pembelian	1980	1	-	-	202.061.000
395	Los Sederhana Ps. Dangung-Dangung	Pembelian	1980	1	-	-	83.529.000
396	Rumah Pulat Ps. Dangung-Dangung	Pembelian	1980	1	-	-	11.785.000
397	Udi Kafe Ps. Dangung-dangung	Pembelian	1980	1	-	-	62.646.000
398	WC Ps. Dangung-Dangung	Pembelian	1994	1	-	-	23.673.000
399	Rehab Pasar Dangung-dangung	Pembelian	2016	1	-	-	788.583.000
400	Rehab Pasar Dangung-dangung	Pembelian	2017	1	-	-	89.855.000
401	Revitalisasi Pasar Dangung-dangung	Pembelian	2019	1	-	-	149.393.000
	Revitalisasi Pasar Nagari Dangung-dangung	Pembelian	2020	1	-	-	172.551.280
402							
	- Reklas Masuk KDP Pasar Dangung-Dangung	Pembelian	2020	1	-	-	45.850.000
403							
404	Gudang SRG II	Pembelian	2021	1	-	-	3.993.312.791
405	Gedung PLUT	Hibah	2018	1	-	-	2.933.244.000
406	Pagar Gedung PLUT	Pembelian	2022	1			112.086.278
407	Partisi HPL dan Walpaper Ruangan Kadis	Pembelian	2022	1			34.416.993
408	Teralis Gudang SRG II	Pembelian	2022	1			20.696.036
	Sub Jumlah						19.290.497.278
	4. JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI						
	a. JALAN DAN JEMBATAN						
	- Jalan Khusus						
409	Rabat jalan masuk kantor	APBD	2019	1			75.500.000
	b. INSTALASI						
	- Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya						

NOM OR	SPESIFIKASI BARANG	ASAL / CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELI AN	KEADAAN BARANG			HARGA
NO. URUT	NAMA / JENIS BARANG			B	R R	R B	
1	2	3	4	5			6
410	Sumur gali	APBD	2016	1	-	-	3.500.000
411	Instalasi air (Sumur Resapan)	APBD	2016	1	-	-	1.675.000
	c. JARINGAN						
	- Jaringan Telepon Dibawah Tanah						
412	Jaringan LAN /Telepon	APBD	2019	1			1.000.000
413	Jaringan Listrik		2022	1			11.510.700
	Jumlah irigasi dan jaringan						93.185.700
	5. ASET TETAP LAINNYA						
414	Buku		2008	-	-	-	159.500
415	Pelaminan, Ordas, Tabir, Sibak		2008		-	-	43.000.000
416	Taman portable	APBD	2016	1			5.000.000
417	Keyboard orgen	APBD	2018	1			15.350.000
418	Manakin Alien Laki-laki	APBD	2018	1	-	-	977.500
419	Manakin Alien Perempuan	APBD	2018	1	-	-	977.500
420	Manakin ful body Lakiu-laki	APBD	2018	3	-	-	2.415.000
421	Manakin ful body Perempuan	APBD	2018	3	-	-	2.415.000
	Sub Jumlah						70.294.500
	EKSTRA KOMPETABLE :						
422	Manakin Kepala	APBD	2018	24	-	-	759.000
423	Manakin Badan pakai busa	APBD	2018	12	-	-	2.070.000
424	Manakin Kepala Botak	APBD	2018	2	-	-	322.000
425	Manakin Badan Cowok	APBD	2018	2	-	-	368.000
	JUMLAH EKSTRA KOMPETABLE						3.519.000
	JUMLAH ASET TETAP LAINNYA						73.813.500
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan						
426	KDP Pasar Dukung-Dukung	APBD	2009	-	-	-	0
427	KDP Pasar Durian Tinggi	APBD		-	-	-	0
428	KDP Bangunan Gudang SRG	APBD	2015	-	-	-	0
429	KDP Bangunan Gudang SRG	APBD	2016	-	-	-	0
430	KDP Bangunan Gudang SRG	APBD	2017	-	-	-	0
431	KDP Perencanaan Pembangunan / Revitalisasi Pasar Dukung-Dukung	APBD	2022	1	-	-	59.330.488
	Sub Jumlah						59.330.488
	TOTAL ASET TETAP						24.867.385.407
	7. ASET LAINNYA						
	Kendaraan :						
432	Kendaraan Roda 2	APBN	1990	-	-	-	0
433	Kendaraan Dinas Roda 2	APBN	1990	-	-	-	0
434	Kendaraan Dinas Roda 2	APBN	1991	-	-	1	3.900.000
435	Kendaraan Dinas Roda 2	APBN	1991	-	-	1	3.900.000
436	Kendaraan Dinas Roda 2	APBN	1991	-	-	1	5.200.000
437	Kendaraan Dinas Roda 2	APBN	1991	-	-	-	0
438	Kendaraan Roda 2	APBN	1991	-	-	1	4.300.000
439	Kendaraan Dinas Roda 2	APBN	1992	-	-	-	0

NOMOR	SPEKIFIKASI BARANG	ASAL / CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG			HARGA
NO. URUT	NAMA / JENIS BARANG			B	R R	R B	
1	2	3	4	5			6
440	Kendaraan Dinas Roda 2	APBN	1996	-	-	-	0
441	Kendaraan Dinas Roda 2	APBN	1996	-	-	-	0
	Sub Jumlah						17.300.000
	JUMLAH ASET TETAP						24.884.685.407
	BARANG MILIK PROPINSI ;						
	1. Tanah :						
442	Tanah Kantor	APBN	1993	1	-	-	27.500.000
443	Tanah Perumahan	APBN	1993	1	-	-	84.900.000
444	Tanah Perumahan	APBN	1994	1	-	-	53.500.000
	Sub Jumlah						165.900.000
	2. Bangunan :						
445	Bangunan Rumah Tinggal		1968	1	-	-	15.000.000
446	Bangunan Rumah Tinggal		1974	1	-	-	13.000.000
447	Bangunan Workshop		1982	1	-	-	13.800.000
	Sub Jumlah						41.800.000
	J U M L A H						207.700.000
							25.092.385.407

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai sasaran RPJMD tahun 2016 – 2021 mengalami perubahan sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB pada awal tahun 2020. Dalam menyikapi rekomendasi tersebut maka Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM diminta untuk melakukan reevaluasi dan reinventasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Sebelum perubahan, jumlah IKU yang menjadi tanggungjawab Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM hanya 3 (tiga) jenis. Setelah terjadi perubahan IKU Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM menjadi 7 jenis seperti yang ditampilkan dalam tabel 2.3. berikut ini.

Tabel. 2.3 Realisasi Pelaksanaan Urusan yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

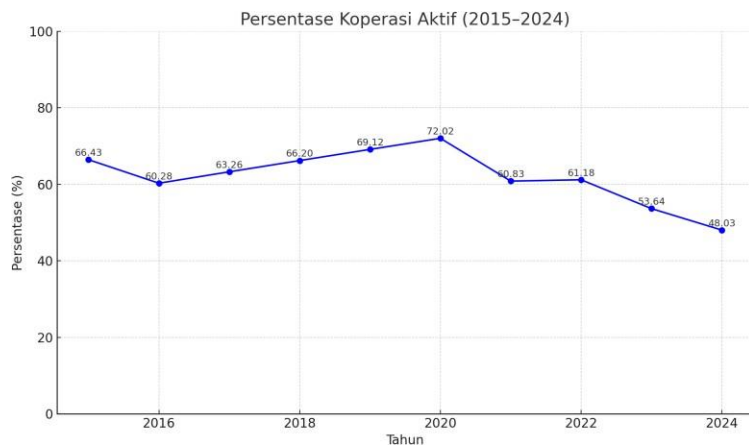
No .	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH												
1	Persentase koperasi aktif	%	66,43	60,28	63,26	66,20	69,12	72,02	60,83	61,18	53,64	48,03	N/A
2	Jumlah koperasi aktif	Unit	129	129	136	143	150	157	132	134	118	122	N/A
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	UMKM	6.225	7.532,25	753.225	828.547,5	911.402,25	911.402,25	8.271	8.315	8.444	8.650	N/A
4	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	0,94	1,94	2,94	3,94	4,94	5,94	0,92	3,2	4,54	4,54	N/A
5	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	27	27,9	28,3	28,6	29,25	29,35	13,96	3,88	1,47	1,47	N/A
	PERDAGANGAN												
1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	26,3	28	35	45	50	55	28	25,10	12,11	4,30	N/A

2.1.3.1 Realisasi dan Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

A. Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Persentase Koperasi Aktif

- Target meningkat signifikan dari 60,28% (2021) ke 72,02% (2025).
- Realisasi justru menurun drastis, dari 60,83% (2021) ke 48,03% (2024).

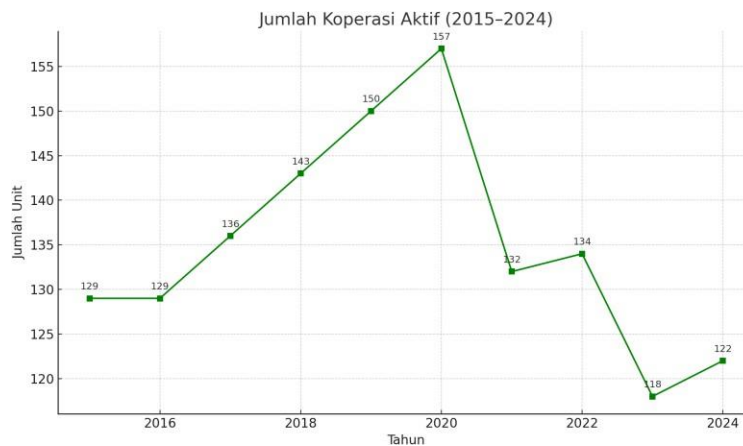


Berikut adalah grafik Persentase Koperasi Aktif dari tahun 2015 hingga 2024. Terlihat bahwa terjadi penurunan signifikan sejak tahun 2020, yang sebelumnya merupakan titik tertinggi (72,02%). Tren ini dapat menjadi perhatian penting dalam evaluasi kinerja dan perumusan strategi ke depan untuk penguatan kelembagaan koperasi.

- Interpretasi:
 - Penurunan menunjukkan banyak koperasi yang tidak aktif atau dibubarkan.
 - Penurunan ini dipicu oleh lemahnya pendampingan, kurangnya SDM koperasi, atau dampak pandemi terhadap operasional koperasi.

2. Jumlah Koperasi Aktif (Unit)

- Target dari 129 (2020) ke 157 (2025).
- Realisasi justru menurun dari 132 (2021) ke 122 (2024).

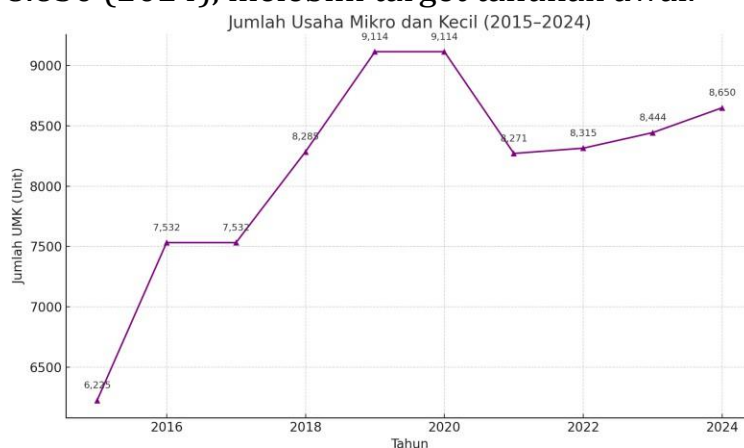


Berikut adalah grafik Jumlah Koperasi Aktif dari tahun 2015 hingga 2024. Tampak peningkatan yang stabil hingga tahun 2020, kemudian penurunan mulai tahun 2021 hingga 2023, dengan sedikit kenaikan kembali di 2024. Ini dapat mencerminkan dinamika pembinaan koperasi dan kondisi ekonomi setempat.

- Interpretasi:
 - Cerminan bahwa regenerasi koperasi kurang berhasil dan tidak ada peningkatan pembentukan koperasi baru yang aktif.
 - Terdapat kemungkinan restrukturisasi atau penghapusan koperasi tidak aktif, tetapi tidak diimbangi dengan pembentukan koperasi produktif baru.

3. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMKM)

- Target mengalami kenaikan progresif ke angka sangat tinggi pada 2024–2025 (911.402,25).
- Realisasi meningkat stabil dari 8.271 (2021) ke 8.650 (2024), melebihi target tahunan awal.



Berikut adalah grafik Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dari tahun 2015 hingga 2024. Terlihat peningkatan yang signifikan hingga tahun 2020, lalu sedikit penurunan pada 2021, dan tren naik kembali hingga 2024. Ini mencerminkan dinamika pertumbuhan UMK yang cukup positif secara umum.

- Catatan Penting:

- Terdapat anomali angka target 2024–2025, yang tidak realistis (kenaikan dari 8.500 ke 911 ribu UMKM). Kemungkinan ini adalah kesalahan ketik/data.
- Meski begitu, tren peningkatan realisasi konsisten dan positif.

4. Meningkatnya Koperasi Berkualitas (%)
 - Target dari 1,94% (2021) ke 5,94% (2025).
 - Realisasi meningkat dari 0,92% (2021) ke 4,54% (2023 dan 2024).



Berikut adalah grafik Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dari tahun 2015 hingga 2024. Terlihat peningkatan stabil hingga 2019, lalu penurunan tajam pada 2020 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Setelah itu, tren kembali naik hingga 2023 dan stagnan di 2024. Ini mencerminkan upaya perbaikan kualitas koperasi yang cukup positif meskipun sempat terdampak pandemi.

- Interpretasi:
 - Meski belum menyentuh target, terjadi peningkatan kualitas koperasi secara bertahap.
 - Mengindikasikan adanya perbaikan manajemen, akuntabilitas, atau aspek legal koperasi.

5. Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha (%)
 - Target naik dari 27% ke 29,36%.
 - Realisasi justru anjlok dari 13,96% (2021) ke 1,47% (2023 dan 2024).



Berikut adalah grafik Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha dari tahun 2015 hingga 2024. Terlihat tren peningkatan hingga 2020, kemudian terjadi penurunan tajam mulai 2021 akibat dampak pandemi COVID-19. Hingga 2024, tren tetap rendah dan stagnan. Hal ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi sektor usaha mikro dalam bertransformasi menjadi wirausaha setelah pandemi.

- Interpretasi:
 - Transformasi UMKM menjadi wirausaha mandiri tidak berjalan efektif.
 - Kemungkinan karena:
 - Minimnya pelatihan kewirausahaan.
 - Tidak adanya insentif atau akses permodalan.
 - Tidak terjadinya *scaling-up* usaha mikro menjadi usaha kecil/menengah yang produktif.

B. Indikator Perdagangan

1. Persentase UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku

- Target naik dari 26,3% (2020) ke 55% (2025).
- Realisasi turun tajam dari 28% (2021) ke 4,3% (2024).



Berikut adalah grafik Persentase UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) Bertanda Tera Sah dari tahun 2015 hingga 2024. Terlihat peningkatan signifikan hingga 2020, lalu penurunan tajam mulai 2021 hingga 2024. Ini

menunjukkan tantangan dalam menjaga kepatuhan tera sah, terutama setelah pandemi.

- Interpretasi:
 - Pengawasan alat ukur dan perlengkapannya sangat lemah dan menurun.
 - Bisa disebabkan kurangnya SDM penguji, anggaran operasional tera ulang, atau rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban tera sah.

2.1.3.2 Rangkuman Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan paparan realisasi dan evaluasi capaian kinerja tersebut, dapat diberikan kesimpulan bahwa:

1. Revitalisasi koperasi diperlukan secara menyeluruh, termasuk aspek kelembagaan, SDM, dan manajemen.
2. Perluasan dan peningkatan kapasitas UMKM harus diarahkan pada peningkatan produktivitas dan skala usaha.
3. Transformasi usaha mikro ke wirausaha mandiri tidak efektif, memerlukan intervensi pelatihan dan permodalan yang lebih kuat.
4. Pengawasan dan pelayanan tera ulang perlu diperkuat, agar sistem perdagangan berbasis keadilan ukur dapat terjaga.

2.1.4 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah

Kelompok sasaran yang menjadi fokus utama Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meliputi berbagai pihak yang terkait langsung atau tidak langsung dengan sektor ini. Sasaran ini terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki kepentingan dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi daerah. Berikut adalah beberapa kelompok sasaran utama:

1. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
UMKM merupakan kelompok sasaran utama dalam bidang ini, karena mereka adalah pilar perekonomian lokal yang seringkali membutuhkan dukungan untuk tumbuh dan berkembang.
 - Usaha mikro, kecil, dan menengah yang mengelola produk lokal, kerajinan tangan, kuliner, jasa, atau sektor lainnya.
 - Pelaku UMKM yang terhambat oleh keterbatasan modal, keterampilan, dan akses pasar.
 - UMKM berbasis teknologi yang membutuhkan pendampingan untuk pemanfaatan *e-commerce* atau digitalisasi.
2. Koperasi
Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan masyarakat, juga menjadi sasaran penting dalam bidang ini.

- Koperasi konsumsi yang menyediakan kebutuhan pokok untuk anggotanya.
 - Koperasi produksi yang mengelola produk atau jasa dari anggotanya untuk dipasarkan.
 - Koperasi simpan pinjam yang memberikan akses pembiayaan bagi anggotanya, sering kali di daerah dengan keterbatasan akses perbankan.
3. Petani dan Pengrajin Lokal
 - Petani yang memproduksi bahan baku untuk produk olahan, seperti bahan pangan atau hasil pertanian, yang kemudian dapat dikembangkan melalui usaha kecil dan koperasi.
 - Pengrajin yang membuat kerajinan tangan, tekstil, atau produk berbasis budaya lokal, yang memiliki potensi untuk dipasarkan dalam skala lebih luas.
 - Usaha berbasis sumber daya alam yang memanfaatkan potensi alam daerah (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan) yang perlu dibina agar memiliki nilai tambah ekonomi.
 4. Masyarakat atau Komunitas yang Menerima Program Pemberdayaan
 - Masyarakat miskin atau kelompok rentan yang dapat dilibatkan dalam koperasi atau UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
 - Kelompok perempuan yang menjalankan usaha mikro atau bergabung dalam koperasi, di mana pemberdayaan perempuan sangat penting untuk keberhasilan usaha kecil.
 - Kelompok pemuda atau pelajar yang dapat dilibatkan dalam pelatihan kewirausahaan untuk menciptakan calon pengusaha baru.
 5. Pengusaha dan Pedagang Lokal
 - Pedagang pasar tradisional yang memasarkan produk dari UMKM atau koperasi.
 - Pengusaha lokal yang membutuhkan dukungan dalam memperluas pasar atau meningkatkan kualitas produk.
 - Pedagang eceran dan pengecer yang menjadi perantara distribusi barang antara produsen UMKM dengan konsumen.
 6. Penyedia Layanan Keuangan dan Pembiayaan
 - Perbankan dan lembaga keuangan yang menyediakan akses pembiayaan bagi UMKM dan koperasi. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pembiayaan mikro menjadi sangat penting untuk memudahkan akses modal usaha.
 - Lembaga pembiayaan non-bank yang dapat memberikan pinjaman mikro atau pendampingan keuangan untuk UMKM dan koperasi.
 7. Penyedia Layanan Pelatihan dan Konsultasi
 - Lembaga pendidikan dan pelatihan yang memberikan pelatihan kewirausahaan, manajemen bisnis, keuangan, dan keterampilan teknis untuk meningkatkan kapasitas SDM UMKM dan koperasi.

- Konsultan bisnis yang membantu UMKM dan koperasi dalam merumuskan strategi bisnis, perencanaan keuangan, atau digitalisasi usaha.
8. **Instansi Pemerintah dan Lembaga Pengawas**
 - Pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan, peraturan, dan program-program untuk mendukung koperasi dan UMKM.
 - Instansi pengawasan yang bertugas mengawasi kualitas produk, keamanan konsumen, dan penerapan peraturan terkait perdagangan dan koperasi.
 9. **Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Sosial**
 - LSM atau NGO yang bekerja untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik melalui pelatihan kewirausahaan atau bantuan pendampingan untuk UMKM dan koperasi di daerah.
 - Organisasi kemasyarakatan yang berfokus pada pengembangan ekonomi komunitas dan pemberdayaan UMKM lokal.
 10. **Pemasok dan Distributor**
 - Pemasok bahan baku yang menyuplai bahan baku untuk produksi UMKM dan koperasi.
 - Distributor yang menghubungkan produk dari UMKM dan koperasi ke pasar lebih luas, termasuk pasar lokal, regional, atau internasional.
 - Pengecer dan agen pemasaran yang membantu menjual produk UMKM dan koperasi ke konsumen akhir.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Pelayanan

1. **Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)**

BPOM berperan penting dalam memastikan keamanan dan kualitas produk yang dipasarkan, terutama untuk produk pangan dan obat-obatan yang dihasilkan oleh UMKM dan koperasi. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM bekerja sama dengan BPOM untuk memastikan produk yang dipasarkan oleh UMKM sudah memenuhi standar keamanan pangan dan izin edar. Selain itu, BPOM juga memberikan pembinaan dan pelatihan kepada UMKM mengenai prosedur dan regulasi dalam pengawasan produk yang aman dan memenuhi standar.

Kolaborasi utama: Pengawasan produk UMKM dalam hal keamanan pangan dan obat.

Manfaat bagi UMKM: Mendapatkan sertifikasi produk yang aman untuk dikonsumsi, meningkatkan kepercayaan konsumen.
2. **Dinas Kesehatan (terkait PIRT – Izin Produksi Pangan Rumah Tangga)**

Dinas Kesehatan memiliki peran dalam memberikan izin PIRT untuk UMKM yang memproduksi pangan olahan secara rumahan atau kecil. Dinas

Perdagangan, Koperasi, dan UMKM berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk membantu UMKM dalam mengurus izin PIRT, yang memungkinkan produk mereka dipasarkan secara legal dan aman untuk konsumen. Selain itu, Dinas Kesehatan juga membantu dalam memberikan edukasi terkait higienitas dan kualitas produk pangan.

Kolaborasi utama: Bantuan untuk UMKM dalam mendapatkan izin PIRT dan pelatihan sanitasi pangan.

Manfaat bagi UMKM: Dapat memperoleh izin produksi yang sah dan meningkatkan kualitas produk pangan.

3. KPP Pratama (Kantor Pelayanan Pajak Pratama)

KPP Pratama memberikan fasilitasi dalam pembayaran pajak bagi UMKM, terutama dalam hal pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM bekerja sama dengan KPP Pratama untuk memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus memastikan bahwa mereka memahami kewajiban perpajakan yang ada dan memiliki akses yang lebih mudah untuk membayar pajak secara tepat waktu.

Kolaborasi utama: Pendampingan perpajakan dan fasilitasi pembayaran pajak bagi UMKM.

Manfaat bagi UMKM: Memastikan kepatuhan perpajakan dan mempermudah proses administrasi pajak.

4. DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

DPMPTSP bertanggung jawab untuk memfasilitasi perizinan usaha, termasuk bagi UMKM dan koperasi yang memulai atau mengembangkan usaha mereka. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM bekerja sama dengan DPMPTSP untuk menyederhanakan proses perizinan usaha, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan izin usaha lainnya. Kolaborasi ini juga mencakup pendampingan kepada pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan administrasi dan mendapatkan izin yang sah.

Kolaborasi utama: Fasilitasi dan pendampingan dalam pengurusan izin usaha dan perizinan terkait.

Manfaat bagi UMKM: Memperoleh izin usaha yang sah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

5. BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan menyediakan perlindungan sosial dan kesejahteraan bagi tenaga kerja di sektor UMKM dan koperasi, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa UMKM dapat mengakses program perlindungan tenaga kerja untuk pekerja mereka, serta mengedukasi

UMKM tentang manfaat dari partisipasi dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Kolaborasi utama: Pemberian perlindungan sosial dan ketenagakerjaan bagi pekerja di UMKM.

Manfaat bagi UMKM: Memberikan kepastian dan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di UMKM.

6. Kemenag (Kementerian Agama) – Terkait Labelisasi Halal

Kemenag melalui LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) memberikan sertifikasi halal untuk produk UMKM, khususnya bagi mereka yang bergerak di bidang makanan, minuman, kosmetik, dan produk lain yang membutuhkan label halal. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM bekerja sama dengan Kemenag untuk membantu UMKM dalam mendapatkan sertifikat halal bagi produk mereka, yang semakin penting untuk menarik konsumen di pasar domestik dan internasional.

Kolaborasi utama: Bantuan dalam memperoleh sertifikat halal dan pendampingan proses pengajuan sertifikasi.

Manfaat bagi UMKM: Memperoleh sertifikat halal yang memungkinkan produk dipasarkan di pasar yang lebih luas, terutama bagi konsumen Muslim.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Sub-bab ini membahas identifikasi masalah-masalah utama yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memberikan pelayanan publik. Fokus utamanya adalah menganalisis sejauh mana pelayanan tersebut mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs), serta kendala struktural dan teknis yang menghambat pencapaian kinerja pelayanan.

2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1.2 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sub-bab ini mengkaji permasalahan pelayanan publik dari perspektif lingkungan hidup strategis. Peranan OPD dalam Pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada Tabel Berikut.

Tabel 2.4 Peran OPD dalam Pencapaian TPB/ SDGs di Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	OPD/ Instansi Sumber Data	TPB
1	BADAN KEUANGAN	16,17
2	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAKAB	17
3	BAG. HUKUM SETDAKAB	10,16
4	BAG. ORGANISASI SETDAKAB	16

No.	OPD/ Instansi Sumber Data	TPB
5	BAPELITBANG	8,9,10,17
6	BKPSDM	5,16
7	BPBD	1,11,13
8	BPS	17
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PECAATATAN SIPIL	1,16,17
10	DINAS KESEHATAN	3,6
11	DINAS KOMINFO	4,9,16,17
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	6,11,12,15
13	DINAS PANGAN	2
14	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	8
15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4
16	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UMKM	8,9
17	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1,8,9,10
18	DINAS PMN	10
19	DINAS PMPTSP	8
20	DINAS PUPR	1,6,11
21	DINAS SOSIAL	1,5,10,16
22	DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	2
23	INSPEKTORAT	16
24	KESBANGPOL	3,10,16
25	PBJ SETDAKAB	16
26	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1,3,5

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

Berdasarkan paparan Tabel 2.5 tersebut, dapat diketahui bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki peranan terhadap TPB 8 dan 9, yang masing-masing didefinisikan sebagai: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi dan Industri, Inovasi dan Infrastruktur.

Tabel 2.5 Capaian Indikator TPB/ SDGs pada Organisasi Perangkat Daerah

No	OPD/Instansi Sumber Data	SS		SB		BB		NA		TOTAL
			%		%		%		%	
1	BADAN KEUANGAN	3	50%	2	33%		0%	1	17%	6
2	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAKAB		0%		0%		0%	2	0%	2
3	BAGIAN HUKUM SETDAKAB	2	100%		0%		0%		0%	2
4	BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB	2	67%		0%		0%	1	33%	3
5	BAPELITBANG	2	25%	2	25%		0%	4	50%	8
6	BKPSDM		0%	2	100%		0%		0%	2
7	BPBD	1	9%	7	64%	3	27%		0%	11
8	BPS	5	100%		0%		0%		0%	5
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL	4	80%		0%		0%	1	20%	5
10	DINAS KESEHATAN	25	63%	10	25%		0%	5	13%	40
11	DINAS KOMINFO	4	44%		0%	1	11%	4	44%	9
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	3	21%	4	29%	4	29%	3	21%	14
13	DINAS PANGAN	2	50%		0%		0%	2	50%	4
14	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		0%	2	50%		0%	2	50%	4
15	DINAS PENDIDIKAN	6	38%	8	50%	1	6%	1	6%	16
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9	56%	4	25%		0%	3	19%	16
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI UMKM	1	33%		0%		0%	2	67%	3
18	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	5	38%	3	23%		0%	5	38%	13
19	DINAS PMN	2	40%	2	40%		0%	1	20%	5
20	DINAS PMPTSP		0%		0%		0%	2	100%	2
21	DINAS PUPR	4	29%	5	36%	4	29%	1	7%	14
22	DINAS SOSIAL	6	46%	5	38%		0%	2	15%	13
23	DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKUTURA DAN PERKEBUNAN		0%		0%		0%	1	100%	1
24	INSPEKTORAT		0%	1	100%		0%		0%	1
25	KESBANGPOL	3	50%	2	33%		0%	1	17%	6
26	PBJ SETDAKAB	1	100%		0%		0%		0%	1
		90		59		13		44		206

Sumber: Ringkasan Eksekutif KLHS

Berdasarkan Tabel 2.6, diketahui bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki capaian 33% SS (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional) dan 67% NA (indikator yang belum memiliki data. Adapun jabaran terhadap data NA dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.6 Rekomendasi Skenario Alternatif dan Rekomendasi Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	No. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	BASELINE 2023	CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN						PROYEKSI CAPAIAN	SKENARIO ALTERNATIF	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUNAN	SUMBER PENDANAAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030						
116	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat	NA	NA	48%	50%	52%	54%	56%	60%	Sudah tercapai	Upaya Tambahan	Penempatan tenaga kerja	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	APBD, APBD Prov, APBN
119	8.3.1 (c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	25%	NA	NA	5%	5%	5%	5%	5%	5%	Sudah terlaksana, belum tercapai	Upaya Tambahan	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Pemangku Kepentingan	1.000.000.000	APBD, APBD Provinsi, Kerjasama dengan Pelaku Usaha

2.2.2 Identifikasi Isu Strategis Sesuai Lingkungan Dinamis

2.2.2.1 Isu Global yang Relevan dengan Permasalahan Perangkat Daerah

a. Demografi Global dan Bonus Demografi

Demografi global sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi dan sosial yang memberikan tantangan peningkatan kebutuhan hidup masyarakat tetapi ketersediaan sumber daya yang semakin terbatas. Pada tahun 2045, Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan potensi angkatan kerja produktif yang tinggi. Berdasarkan kajian BPS (2022), Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 sebanyak 388.375 jiwa, dengan rincian 194.292 jiwa penduduk laki-laki dan 194.083 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,11 persen.

Kalau dilihat jumlah Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebanyak 79 nagari, maka dengan jumlah penduduk sebesar 388.375 jiwa tersebut, rata-rata jumlah penduduk per nagari adalah sebesar 4.916 jiwa. Komposisi penduduk angkatan kerja (usia 15-64 tahun) mencapai 71,09% dari jumlah penduduk dengan rasio ketergantungan sebesar 40,66% pada tahun 2035. Tingginya jumlah penduduk usia muda memberikan tantangan pemenuhan perlindungan social dan pembukaan lapangan pekerjaan (Bappenas, 2023).

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, jaminan sosial (kesehatan dan pendidikan), peluang lapangan kerja bagi generasi muda.

b. Disrupsi Teknologi

Era disrupsi tercipta karena adanya perubahan akibat perkembangan teknologi digital. masa di mana perubahan-perubahan yang terjadi disebabkan karena adanya inovasi yang begitu hebat sehingga mengubah sistem dan tatanan kehidupan masyarakat secara luas. *Digital Disruption* atau Disrupsi Teknologi Digital adalah suatu efek yang mengubah hal-hal mendasar (Fundamental) mengenai pandangan serta perilaku masyarakat terhadap pasar, industri, budaya, dan berbagai proses di dalamnya yang disebabkan oleh inovasi dan perkembangan teknologi digital yang semakin maju. Disrupsi digital teknologi yang mengakibatkan revolusi industri memanglah nyata dan telah hadir di berbagai macam sektor, berikut 5 contoh disrupsi digital teknologi dari revolusi industri yang terjadi di Indonesia:

1. Disrupsi Teknologi Digital di Bidang Kesehatan.
2. Disrupsi Teknologi Digital di Bidang Keuangan (*Finance*).

3. Disrupsi Teknologi Digital pada Layanan Pelanggan (*Customer Service*).
 4. Disrupsi Teknologi Digital di Bidang Pendidikan.
 5. Disrupsi Teknologi Digital di Bidang Retail.
- c. Perkembangan Teknologi

Disrupsi teknologi merupakan fenomena perkembangan teknologi yang berpengaruh pada perilaku masyarakat, pasar, industri, dan lain sebagainya. Disrupsi teknologi ditandai dengan inovasi-inovasi yang mendorong produktivitas, efektivitas, dan efisiensi sumber daya dan operasional. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara optimal dan meminimalkan risiko disrupsi teknologi. Perkembangan teknologi seperti *Internet of Things* (IOT), Kecerdasan Buatan (AI), rekayasa genetik, *nanotechnology*, dan lain sebagainya akan mempengaruhi sektor manufaktur, perkembangan pendidikan-kesehatan, dan berbagai sector lainnya. Selain itu, teknologi membuka peluang baru pembangunan ekonomi, mendorong inovasi, dan transformasi tata kelola kinerja pelayanan publik (Bappenas, 2023).

d. Perdagangan Internasional

Aktivitas perdagangan merupakan sarana penting untuk menunjang kepentingan ekonomi suatu negara, perdagangan dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok yaitu perdagangan domestik dan perdagangan internasional. Perdagangan dengan skala internasional bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara. Manfaat dilakukannya perdagangan internasional;

1. Menambah Devisa Negara.
2. Memenuhi Kebutuhan Negara Lain
3. Mendapat Keuntungan Internal dan Eksternal
4. Memperluas Pasar

2.2.2.2 Isu Nasional yang Relevan dengan Permasalahan Perangkat Daerah

a. Rendahnya Tingkat Produktivitas di Tengah Meningkatnya Persaingan Global

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau total produksi barang dan jasa per tenaga kerja Indonesia pada tahun lalu menurun ke -1,84%. Penurunan pertumbuhan produktivitas ini akan menimbulkan dampak berantai mulai dari penurunan pertumbuhan pendapatan per kapita dan melambatnya pengurangan tingkat kemiskinan. Kombinasi antara penurunan kemampuan sumber daya manusia, rendahnya investasi teknologi dan inovasi bermuara pada kontribusi pertumbuhan TFP yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari sembilan sektor ekonomi, lima mengalami penurunan pertumbuhan produktivitas, yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, transportasi & komunikasi, dan sektor jasa-jasa dan dari lima sektor di atas, sektor pertanian diikuti sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan memiliki tingkat produktivitas di bawah produktivitas rata-rata nasional. Artinya Dari sembilan sektor ekonomi, lima mengalami penurunan pertumbuhan produktivitas, yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, transportasi & komunikasi, dan sektor jasa-jasa. Kelima sektor ini memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 71% dan lapangan kerja bagi 89% tenaga kerja dan dari lima sektor di atas, sektor pertanian diikuti sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan memiliki tingkat produktivitas di bawah produktivitas rata-rata nasional dan merupakan lapangan kerja bagi 70% tenaga kerja.

b. Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi pada Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi

Sesuai UUD Tahun 1945, Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”, maka dapat dipahami bahwa system perekonomian yang dianut oleh Indonesia adalah Sistem Ekonomi Kerakyatan yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Dalam pemahaman ini maka Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan nadi dari perekonomian tersebut. Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah sebagai tonggak penggerak perekonomian sangat diperlukan sehingga amanat UUD 1945 tersebut dapat diwujudkan.

2.2.2.3 Isu Regional yang Relevan dengan Permasalahan Perangkat Daerah

Dalam bidang pembangunan Ekonomi terdapat 2 (dua) isu strategis penting yang perlu direspon secara seksama adalah 1) Pendapatan Setara dengan Negara Maju, dan 2) Kemiskinan Menuju nol persen dan Pengurangan Ketimpangan. Isu Strategis yang dapat dijelaskan dalam Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Sumatera Barat kedepan adalah:

1. Pendapatan Perkapita Daerah Setara dengan Negara Maju

Saat ini Sumatera Barat memiliki PDRB per kapita adalah sebesar USD 3.000 (2022). Dengan desain jangka panjang untuk Provinsi Sumatera Barat 2045. Target capaian PDRB per Kapita adalah sebesar USD 23.000-30.000. Artinya dalam 20 tahun kedepan. Artinya Sumatera Barat membutuhkan perencanaan pembangunan yang

mampu menghasilkan PDRB per kapita penduduk sebesar 9 sampai 11 kali lipat dari pertumbuhan ekonomi sekarang.

Dalam menyikapi desain perencanaan jangka panjang nasional ini PDRB Provinsi Sumatera Barat tidak mungkin dilakukan desain rendah dari nasional. Untuk itu, perlu ditemukan dalam 20 tahun kedepan berapa kapasitas ekonomi optimal yang dimiliki provinsi Sumatera Barat dalam mendorong perekonomian nasional jangka panjang.

2. Pertumbuhan Ekonomi yang Biasa dan Tidak Pesat

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam 2 dekade terakhir memperlihatkan fakta adalah biasa saja dan tidak sepesat pertumbuhan yang terjadi di provinsi tetangga. Berdasarkan tema yang diadukan oleh Provinsi Sumatera Barat dalam desain Pembangunan jangka panjang 2025-2045 sebagai “Mandala Pengembangan Agrikultur Bernilai Tinggi, Ekonomi Hijau, dan Pariwisata Kelas Dunia, yang Bersendi Kearifan Budaya Lokal” terdapat 3 desain kawasan pembangunan untuk Sumatera Barat adalah 1) Kawasan strategis agrikultur, 2) Kawasan Strategis Perkotaan, 3) kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Minangkabau Mentawai, dan 4) Kawasan Afirmasi Kepulauan Mentawai. Kawasan Strategis Agrikultur di Sumatera Barat adalah kawasan untuk pembangunan dan pengembangan sektor pertanian padi, buah-buahan, kopi, hortikultura dan peternakan. Kawasan ini berada terutama di bagian utara dan timur laut serta bagian Selatan dan timur provinsi dari Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya kawasan perkotaan sebagai growth pool dan pusat pengembangan industri berbasis keunggulan wilayah adalah untuk wilayah yang berada di kawasan sekitar Kota Padang dan Bukittinggi. Kemudian untuk kewilayahan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi kawasan wilayah Minangkabau dan Kepulauan Mentawai.

Koperasi

Isu strategis terkait koperasi bisa sangat bervariasi tergantung pada konteks regional, ekonomi, dan politik. Namun, beberapa isu yang umumnya muncul dalam kaitannya dengan koperasi adalah:

1. Perubahan regulasi pemerintah yang ketat dan sering berubah-ubah dapat menghambat pertumbuhan dan operasi koperasi

2. Perkembangan teknologi, terutama dalam hal fintech dan platform digital, dapat mengubah cara koperasi beroperasi dan berinteraksi dengan anggotanya
3. Koperasi sering kali dianggap sebagai model bisnis yang berkelanjutan karena fokusnya pada kepentingan jangka panjang anggotanya dan komunitas. Tantangan seperti perubahan iklim dan kebutuhan akan energi terbarukan dapat mempengaruhi cara koperasi beroperasi dan menyediakan layanan
4. Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota koperasi agar dapat memahami dan mengelola koperasi dengan baik, termasuk pemahaman tentang manajemen keuangan, kepemimpinan, dan perubahan teknologi.
5. Akses terhadap modal yang cukup untuk memulai atau mengembangkan operasional koperasi
6. Pengelolaan Manajemen risiko untuk menjaga keberlangsungan koperasi, mulai dari risiko keuangan hingga risiko reputasi

UMKM

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kualitas usaha Koperasi UMKM (KUMKM).
2. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM dalam menghadapi era ekonomi kapitalisme global.
3. Peningkatan usaha koperasi sektor riil dan usaha simpan pinjam koperasi sehingga berdampak pada peningkatan anggota Koperasi UMKM
4. Peningkatan kapasitas usaha dan daya saing Koperasi UMKM
5. Pengembangan produk unggulan daerah yang dikelola Koperasi UMKM

Kewirausahaan

Dalam rangka peningkatan kewirausahaan memerlukan pendekatan strategis yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa isu strategis yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kewirausahaan termasuk adalah:

1. Kebijakan kewirausahaan yang tepat sasaran
Pendekatan kepada wirausahawan tidak berlandaskan *one-size fits all- approach*. Kebijakan kewirausahaan idealnya memperhatikan tahapan kewirausahaan yang berbeda (e.g. bakal wirausaha, usaha rintisan, usaha yang sudah lama berdiri), motivasi berwirausaha (e.g. keterpaksaan atau peluang), dan sektor usaha (e.g. subsektor industri kreatif).

2. Kewirausahaan sebagai upaya mentransformasi potensi daerah menjadi aktifitas kewirausahaan Kewirausahaan Sumatra Barat bisa mewakili eksplorasi potensi daerah yang menjadi pusat keunggulan kompetitif Sumatra Barat, yaitu potensi pariwisata, pertanian terintegrasi, dan perikanan dan kelautan
3. Pendidikan Kewirausahaan: Integrasi dalam Kurikulum: Memasukkan pendidikan kewirausahaan ke dalam kurikulum pendidikan *formal* dan *non-formal* di semua tingkatan pendidikan untuk membekali generasi muda dengan keterampilan dan pemahaman yang diperlukan
4. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia:
 - Pelatihan dan Pengembangan: Menyediakan pelatihan dan pengembangan Keterampilan kewirausahaan bagi calon pengusaha, baik dalam bentuk *workshop*, seminar, atau program pelatihan *online*.
 - *Mentorship*: Mendorong program mentorship yang melibatkan pengusaha berpengalaman untuk memberikan panduan kepada para pemula
5. Dukungan Infrastruktur:
 - Akses Internet dan Teknologi: Memastikan akses yang luas ke internet dan teknologi modern untuk mendukung bisnis yang bergantung pada *platform online*
 - Inkubator Bisnis dan Ruang Kerja Bersama: Membangun dan mendukung inkubator bisnis serta ruang kerja bersama untuk memberikan lingkungan yang mendukung bagi *startup*
6. Regulasi yang Mendukung:
 - Pemangkasan Birokrasi: Meringankan beban birokrasi dan menyederhanakan proses perizinan untuk memudahkan pendirian bisnis
 - Regulasi Pro-Kewirausahaan: Mendorong kebijakan yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan bisnis, seperti insentif pajak dan dukungan keuangan
7. Pendanaan dan Investasi:
 - Akses Modal Usaha: Meningkatkan akses pengusaha ke modal usaha melalui berbagai skema pinjaman mikro, modal ventura, atau *crowdfunding*
 - Mendorong Investor Lokal dan Luar Negeri: Membuat lingkungan yang menarik bagi investor lokal dan internasional untuk berinvestasi di bisnis lokal.

8. Pemasaran dan Jaringan:
 - Promosi dan Pemasaran: Mendukung upaya promosi dan pemasaran bagi produk dan jasa lokal, baik secara lokal maupun global.
 - Pengembangan Jaringan Bisnis: Mendorong pembentukan jaringan bisnis dan kolaborasi antarpengusaha untuk meningkatkan peluang bisnis dan pertumbuhan bersama
9. Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat:

Forum Kewirausahaan: Membentuk forum atau kelompok kerja yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk merancang dan melaksanakan strategi kewirausahaan bersama
10. Monitoring dan Evaluasi:

Sistem Pemantauan Kewirausahaan: Membangun sistem pemantauan dan evaluasi untuk melacak kemajuan strategi kewirausahaan, dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Dengan mengadopsi pendekatan holistik yang mencakup aspek-aspek tersebut, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan kewirausahaan dan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi lokal

Ekspor Barang dan Jasa

Isu strategis dalam ekspor barang dan jasa di Sumatera Barat mencakup sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan keberlanjutan perdagangan internasional di daerah tersebut.

Beberapa isu strategis yang mungkin dihadapi melibatkan faktor-faktor ekonomi, regulasi, serta infrastruktur. Berikut adalah beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan:

1. Infrastruktur dan Transportasi:
 - Infrastruktur transportasi yang terbatas dapat menjadi hambatan untuk mengirimkan barang ke pasar internasional dengan efisien.
 - Kurangnya konektivitas dan akses yang baik ke pelabuhan atau bandara dapat memperlambat proses ekspor
2. Diversifikasi Produk:
 - Ketergantungan pada produk atau sector ekonomi tertentu dapat meningkatkan risiko terhadap fluktuasi pasar global.
 - Pentingnya diversifikasi produk untuk mengurangi risiko dan meningkatkan daya saing di pasar internasional

3. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:
 - Kurangnya keterampilan dan pengetahuan tentang pemasaran internasional dan manajemen rantai pasokan global dapat menjadi kendala bagi pelaku usaha
 - Penyesuaian dengan standar global untuk meningkatkan daya saing produk di pasar internasional
4. Standarisasi Produk:
 - Kepatuhan terhadap standar internasional dan persyaratan teknis dapat menjadi hambatan jika tidak diikuti atau dipahami dengan baik
 - Penyesuaian dengan standar global untuk meningkatkan daya saing produk di pasar internasional.
5. Regulasi Ekspor dan Birokrasi:
 - Proses birokrasi yang rumit dan regulasi ekspor yang kompleks dapat menghambat kelancaran proses ekspor
 - Peningkatan efisiensi prosedur ekspor dan pemangkasan birokrasi dapat meningkatkan daya saing.
6. Pengembangan Pasar Baru:
 - Mencari peluang di pasar baru dan mengembangkan jejaring bisnis dapat menjadi tantangan bagi perusahaan yang belum berpengalaman dalam ekspor;
 - Dukungan pemerintah dan lembaga terkait dalam memfasilitasi akses ke pasar baru dapat membantu mengatasi masalah ini.
7. Teknologi dan Inovasi:
 - Adopsi teknologi baru dan inovasi dalam proses produksi dan pemasaran dapat meningkatkan daya saing produk di pasar internasional
 - Isu terkait dengan investasi dalam teknologi dan perubahan budaya dalam perdagangan.
8. Ketidakpastian Ekonomi Global:
 - Fluktuasi ekonomi global, termasuk perubahan dalam permintaan dan harga komoditas, dapat mempengaruhi kinerja ekspor Sumatera Barat
 - Perusahaan perlu memiliki strategi untuk mengelola ketidakpastian ekonomi global.
9. Promosi dan Pemasaran Internasional
 - Kurangnya upaya promosi dan pemasaran yang efektif di pasar internasional dapat membatasi akses dan pemahaman terhadap produk Sumatera Barat
 - Peningkatan upaya pemasaran dan promosi dapat meningkatkan visibilitas produk di pasar global.

2.2.2.4 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dirumuskan dengan memperhatikan Potensi Daerah, isu KLHS, dan Isu Lingkungan Dinamis (Global, Nasional, dan Regional).

Paparan mengenai Isu Strategis dapat dilihat pada Tabel 2.8 Berikut ini.

Tabel 2. 7 Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ASPEK DAYA SAING						
Pengembangan Agroindustri dan Pertanian	Perlunya mendorong peningkatan ekonomi kreatif (inovasi, membangun komunitas entrepreneur kreatif, city branding, creative centre)	Potensi pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan belum dimanfaatkan secara optimal	Perkembangan Teknologi	Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi pada Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi-industri padat karya dan terampil, serta padat teknologi dan inovasi yang belum berkembang
ASPEK PELAYANAN UMUM						
	Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah			Rendahnya tingkat produktivitas ditengah meningkatnya persaingan global	- Stabilitas Ekonomi Makro - Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	- Belum terwujudnya pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai kondisi nasional - Belum tercapainya tingkat produktivitas ekonomi - Belum optimalnya kapasitas lembaga keuangan domestik
					-	-

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan Tabel tersebut, dapat dijelaskan isu-isu Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut ini.

1. Aspek Daya Saing

Potensi Daerah:

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi pengembangan agroindustri dan pertanian yang besar. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Permasalahan:

Masih terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan ekonomi kreatif melalui berbagai strategi, antara lain inovasi, pembangunan komunitas entrepreneur kreatif, city branding, serta pengembangan pusat-pusat kreatif (creative centre).

Isu KLHS:

Potensi pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan belum dimanfaatkan secara optimal.

Isu Lingkungan Dinamis:

- Global: Perkembangan teknologi menjadi tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan daya saing daerah.
- Nasional: Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi terhadap penciptaan nilai tambah ekonomi.
- Regional: Fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, serta peningkatan produktivitas ekonomi di kawasan regional.

Isu Strategis Daerah:

Perlu adanya dorongan yang lebih kuat untuk meningkatkan inovasi, produktivitas ekonomi, dan pengembangan industri padat karya maupun padat teknologi. Upaya penguatan inovasi dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam memaksimalkan potensi pertanian dan agroindustri daerah yang hingga kini belum berkembang optimal.

2. Aspek Pelayanan Umum

Potensi Daerah:

Sektor pelayanan publik memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Permasalahan:

Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu tantangan utama dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Isu Lingkungan Dinamis:

- Global: Rendahnya tingkat produktivitas di tengah meningkatnya persaingan global.
- Nasional: Tantangan berupa stabilitas ekonomi makro serta integrasi ekonomi domestik dan global.
- Regional: Belum optimalnya peran daerah dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi kawasan.

Isu Strategis Daerah:

- Belum terwujudnya pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional.
- Rendahnya produktivitas daerah yang mengakibatkan daya saing lemah.
- Belum optimalnya kapasitas lembaga keuangan domestik dalam mendukung pembangunan daerah.

Berdasarkan identifikasi potensi, permasalahan, serta isu strategis di atas, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam periode Renstra 2025–2029 perlu difokuskan pada:

1. Pemanfaatan potensi pertanian dan agroindustri secara berkelanjutan dengan dukungan inovasi teknologi.
2. Peningkatan produktivitas ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta integrasi dalam rantai nilai global.
3. Penguatan ekonomi kreatif melalui city branding, pengembangan pusat kreatif, dan komunitas entrepreneur.
4. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola keuangan daerah.
5. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing, sesuai dengan arah pembangunan nasional dan regional.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

3.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota

Visi Pembangunan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menggambarkan arah Pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Pengertian visi ini sesuai menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyajian dalam dokumen perencanaan merupakan implementasi pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan daerah disamping pendekatan lainnya, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, serta atas-bawah dan bawah-atas. Dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pendekatan politis tersebut adalah menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD.

Berdasarkan peraturan diatas serta dengan mempertimbangan berbagai permasalahan daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi, capaian pembangunan pada akhir periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, dan berbagai dokumen terkait lainnya yaitu RPJMN tahun 2025-2029, RTRW Daerah 2023-2043, RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2045, serta dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota yang berdekatan, maka visi Pembangunan daerah untuk tahun 2025-2029 adalah: “Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Yang Maju, Sejahtera Dan Bermatabat, Dengan Semangat Saiyo Sakato Menuju Lima Puluh Kota Bangkit, Menang, Dan Berkelanjutan”

Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu *Kabupaten Lima Puluh Kota, Bermatabat, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan*. Kabupaten Lima Puluh Kota yang dimaksud adalah selain sebagai

wilayah administrasi Pemerintah, Lima Puluh Kota juga dengan segala kesatuannya, yaitu: kesatuan demografis, kesatuan geografis, dan kesatuan budaya. Ini berarti, pembangunan yang dilaksanakan di Lima Puluh Kota lima tahun mendatang merupakan Pembangunan yang komprehensif, integral, menyeluruh dan merata. Bermatabat maksudnya Harkat atau harga diri yang menunjukkan eksistensi masyarakat dengan karakteristik dan budaya masyarakat yang dapat dijadikan teladan karena ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinanannya, berangkat dari akar budaya minang "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" dalam arti yang seluas-luasnya dengan menjaga pluralitas budaya yang ada di sekitar kita. Maju maksudnya Perekonomian dan masyarakat yang berdaya saing dengan kualitas hidup yang baik, kreatif dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan ketersediaan infrastruktur dan ketahanan sosial budaya masyarakat. Sejahtera maksudnya Peningkatan pendapatan masyarakat dan meningkatnya nilai tambah ekonomi serta berkurangnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan didukung pemerataan pembangunan yang inklusif serta tersedianya sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan. Berkelanjutan maksudnya Terwujudnya Pembangunan yang tidak merusak lingkungan berbasis ekonomi sirkular, ketangguhan infrastruktur dan ketahanan terhadap kebencanaan dan krisis iklim Sedangkan misi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota Yang Maju, Sejahtera Dan Bermatabat , Dengan Semangat Saiyo Sakato Menuju Lima Puluh Kota Bangkit, Menang Dan Berkelanjutan yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 8 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Memantapkan Kehidupan Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya

Misi ini bertujuan untuk agar masyarakat memiliki akhlak yang mulia berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syarak Basandi Kitabullah dan selalu menjunjung serta melestarikan kebudayaan lokal ditengah globalisasi yang semakin berkembang pesat. Penguatan akhlak dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, toleransi, disiplin, serta etika dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter, baik melalui keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial, menjadi kunci dalam menciptakan individu yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab.

Selain itu, peran lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat juga penting dalam membentuk kesadaran moral dan spiritual masyarakat. pelestarian dan pengembangan budaya menjadi bagian dari Upaya mempertahankan identitas lokal di tengah arus globalisasi. Masyarakat didorong untuk mengenali,

menghargai, dan melestarikan seni, tradisi, serta adat istiadat yang menjadi bagian dari warisan leluhur. Peningkatan kesadaran akan pentingnya budaya juga dapat diwujudkan melalui pendidikan, festival budaya, serta penguatan peran komunitas budaya dalam kehidupan sosial.

2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Misi ini merupakan persyaratan yang penting untuk kemajuan suatu daerah dan mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Hal tersebut sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, terbuka dan transparan. Menerapkan sistem perencanaan, penganggaran, dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dengan cara tersebut dapat mewujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Andal, Sehat, Produktif dan Kompetitif

Misi ini bertujuan untuk mengembangkan individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan agar dapat berkontribusi secara efektif dalam berbagai bidang. Fokus utama dari misi ini adalah memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang baik, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat melalui program kesehatan dan olahraga. Selain itu, misi ini juga mendorong produktivitas dengan meningkatkan keterampilan dan memanfaatkan teknologi, sehingga individu dapat menjadi lebih produktif dalam pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Terakhir, misi ini berupaya menyiapkan masyarakat untuk bersaing ditingkat lokal, nasional, dan global dengan mengembangkan inovasi, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Secara keseluruhan, misi ini bertujuan menciptakan masyarakat yang kuat dan berdaya saing, mendukung pembangunan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

4. Membangun Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata Yang Tangguh Dan Berkeadilan

Pada misi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan dengan menguatkan sektor UMKM, koperasi, industri kecil dan menengah (IKM), serta sektor pariwisata. Misi ini mencerminkan upaya meningkatkan kontribusi ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja formal, peningkatan kewirausahaan, dan penguatan kelembagaan ekonomi

lokal. Keberhasilan misi ini diukur melalui berbagai indikator, antara lain: proporsi jumlah UKM dan IKM non-pertanian, Rasio Kewirausahaan, serta Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB, yang mencerminkan kekuatan ekonomi rakyat. Tingkat Pengangguran Terbuka, Proporsi penciptaan lapangan kerja formal, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan menunjukkan inklusivitas dan daya serap tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita ADHB, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi indikator utama performa makroekonomi daerah. Untuk mendukung ketahanan ekonomi, diukur juga ROA BUMD, Rasio PDRB sektor jasa keuangan, Ekspor barang dan jasa, Rasio pajak daerah terhadap PDRB, serta nilai transaksi saham per kapita. Pada sektor pangan dan pertanian, Tingkat produktivitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta persentase dan stabilitas ketersediaan barang kebutuhan pokok menjadi cerminan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, misi ini menekankan penguatan struktur ekonomi lokal yang tangguh, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika pasar serta mendukung keadilan sosial dalam pembangunan.

5. Meningkatkan Pertanian dan Perkebunan yang Unggul dan Berdaya Saing

Pada misi ini bertujuan untuk mengembangkan sektor pertanian sebagai penggerak utama ekonomi daerah yang produktif, efisien, dan berkelanjutan. Keberhasilan misi ini diukur melalui Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang mencerminkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah. Selain itu, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menjadi indikator penting untuk memastikan ketahanan pangan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan petani dan pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan bergizi.

6. Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan

Misi ini bertujuan untuk memastikan tersedianya layanan dasar yang merata, aman, dan ramah lingkungan bagi seluruh masyarakat. Upaya ini mencakup peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi aman, air minum perpipaan, dan hunian layak, serta penguatan sistem pengelolaan sampah dan penyediaan energi. Selain itu, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperhatikan keberlanjutan lingkungan melalui peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, menjaga tutupan lahan, dan memperluas kapasitas air baku. Ketangguhan terhadap bencana juga menjadi perhatian melalui pengendalian risiko wilayah. Seluruh indikator ini

menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan infrastruktur yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

7. Membangun Kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK)

Misi ini bertujuan untuk memperkuat fungsi Sarilamak sebagai pusat pemerintahan, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota. Pembangunan kawasan ini akan didasarkan pada penyusunan dan implementasi Masterplan serta RDTR IKK Sarilamak sebagai pedoman tata ruang. Pusat kegiatan ekonomi diperkuat melalui pengembangan Pasar Sarilamak menjadi pasar kabupaten. Infrastruktur penunjang seperti ring road IKK, kawasan perkantoran terpadu, dan pembangunan RSUD di Sarilamak akan mendukung konektivitas, efisiensi birokrasi, dan akses layanan kesehatan. Misi ini mencerminkan komitmen untuk membangun pusat pemerintahan yang terencana, modern, dan berdaya saing.

8. Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Nagari

Misi ini bertujuan untuk memperkuat potensi dan kapasitas masyarakat di tingkat nagari (desa) agar dapat mandiri dalam pengelolaan sumber daya dan pengembangan wilayah. Misi ini diarahkan untuk memperkuat peran nagari dalam pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Keberhasilan misi ini diukur melalui peningkatan Persentase Desa Mandiri, yang mencerminkan kemampuan nagari dalam mengelola potensi secara berkelanjutan dan memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.

3.1.2 Tujuan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Mengacu terhadap Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 sebagai puncak acuan dalam melakukan Pembangunan Daerah, maka Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bergerak berdasarkan Misi Kabupaten ke 4 (Empat) yaitu:

“Membangun Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata Yang Tangguh dan Berkeadilan”

Melalui Misi ke 4 (empat) tersebut, diperoleh 2 (dua) sasaran yang dirumuskan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi kewenangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut:

1. Penguatan UKM dan Kewirausahaan Lokal
2. Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro yang Terintegrasi dengan Ekonomi Domestik dan Regional.

Bertolak pada sasaran RPJMD tersebut, maka dirumuskan Tujuan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu:

*“Penguatan UKM dan Kewirausahaan Lokal dan
Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Makro yang Terintegrasi
dengan Ekonomi Domestik dan Regional”.*

3.2 Sasaran Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/ aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah .

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan
2. Meningkatnya Kontribusi UMKM dalam Perekonomian
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Secara lengkap hubungan antara visi-misi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, dan rumusan Tujuan, Sasaran beserta indikator kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penguatan UKM Dan Kewirausahaan Lokal	Penguatan UKM dan Kewirausahaan Lokal Dan Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Makro yang		Persentase dan stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	10,23%	10,21%	10,19%	10,16%	10,14%	10,12%	
Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Makro yang Terintegrasi dengan Enomi Domestik dan Regional REGIONAL	Terintegrasi dengan Enomi Domestik dan Regional		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	13.57%	13.84%	14.11%	14.37%	14.64%	14.91%	
			Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB	0,862%	0,953%	1,044%	1,135%	1,226%	1,317%	
		Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	13.57%	13.84%	14.11%	14.37%	14.64%	14.91%	
			Persentase dan stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	10,23%	10,21%	10,19%	10,16%	10,14%	10,12%	
		Meningkatkan Kontribusi UMKM dalam Perekonomian	Persentase Usaha Kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	2,42%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Proporsi UKM menjalin kemitraan dan Ekspor	1,8%	1,8%	2%	2%	2,5%	3%	
			Rasio volume koperasi terhadap PDRB	0,862%	0,953%	1,044%	1,135%	1,226%	1,317%	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Nilai SAKIP	77,84	77,85	77,86	77,87	77,89	77,90	

3.3 Strategi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.

Penahapan penyelenggaraan Kewenangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengadaan Pembelian Lahan (Tanah) seluas 50000 m2 untuk Pembangunan Pasar Pemerintah Lokus: Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau	Pelaksanaan kegiatan <i>Feasibility Study</i> (FS) dan Perencanaan Pembangunan Pasar Lokus: Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau	Pembangunan Pasar Pemerintah Lokus: Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau	Pembangunan Pasar Pemerintah Pendataan Pedagang Lokus: Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau
• Pembentukan Satgas Pasar • Pemeliharaan (Revitalisasi) dan Pembinaan Pelaku Perdagangan Lokus: Pasar Pemerintah Ampek Batuah, Kecamatan Guguak	Pemeliharaan (Revitalisasi) dan Pembinaan Pelaku Perdagangan Lokus: Pasar Pemerintah Ampek Batuah, Kecamatan Guguak	Pemeliharaan (Revitalisasi) dan Pembinaan Pelaku Perdagangan Lokus: Pasar Pemerintah Ampek Batuah, Kecamatan Guguak	Pemeliharaan (Revitalisasi) dan Pembinaan Pelaku Perdagangan Lokus: Pasar Pemerintah Ampek Batuah, Kecamatan Guguak	Pemeliharaan (Revitalisasi) dan Pembinaan Pelaku Perdagangan Lokus: Pasar Pemerintah Ampek Batuah, Kecamatan Guguak
Pelaksanaan Operasi Pasar dalam rangka peningkatan	Pelaksanaan Operasi Pasar dalam rangka peningkatan	Pelaksanaan Operasi Pasar dalam rangka peningkatan	Pelaksanaan Operasi Pasar dalam rangka peningkatan	Pelaksanaan Operasi Pasar dalam rangka peningkatan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Stabilitas Barang Pokok dan Penting
Pendataan dan Pelaporan Pengendalia n Stock atau Ketersediaan Barang Pokok dan Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Pendataan dan Pelaporan Pengendalia n Stock atau Ketersediaan Barang Pokok dan Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Pendataan dan Pelaporan Pengendalia n Stock atau Ketersediaan Barang Pokok dan Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Pendataan dan Pelaporan Pengendalia n Stock atau Ketersediaan Barang Pokok dan Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Pendataan dan Pelaporan Pengendalia n Stock atau Ketersediaan Barang Pokok dan Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Pendataan dan Pelaporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Pendataan dan Pelaporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Pendataan dan Pelaporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Pendataan dan Pelaporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Pendataan dan Pelaporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Pendataan dan Fasilitasi Pelaku Pasar/UMK M yang memperoleh fasilitasi Pameran Dagang Lokal dan Nasional	Pendataan dan Fasilitasi Pelaku Pasar/UMK M yang memperoleh fasilitasi Pameran Dagang Lokal dan Nasional	Pendataan dan Fasilitasi Pelaku Pasar/UMK M yang memperoleh fasilitasi Pameran Dagang Lokal dan Nasional	Pendataan dan Fasilitasi Pelaku Pasar/UMK M yang memperoleh fasilitasi Pameran Dagang Lokal dan Nasional	Pendataan dan Fasilitasi Pelaku Pasar/UMK M yang memperoleh fasilitasi Pameran Dagang Lokal dan Nasional
Pendataan, Pelatihan, dan Fasilitasi Pelaku Perdagangan Ekspor Barang/Jasa	Pendataan, Pelatihan, dan Fasilitasi Pelaku Perdagangan Ekspor Barang/Jasa	Pendataan, Pelatihan, dan Fasilitasi Pelaku Perdagangan Ekspor Barang/Jasa	Pendataan, Pelatihan, dan Fasilitasi Pelaku Perdagangan Ekspor Barang/Jasa	Pendataan, Pelatihan, dan Fasilitasi Pelaku Perdagangan Ekspor Barang/Jasa
Pelaksanaan kegiatan Tera/ Tera ulang	Pelaksanaan kegiatan Tera/ Tera ulang	Pelaksanaan kegiatan Tera/ Tera ulang	Pelaksanaan kegiatan Tera/ Tera ulang	Pelaksanaan kegiatan Tera/ Tera ulang
Pelaksanaan Pemeriksaan , Pengawasan, dan Pengecekan Kesehatan Koperasi dengan	Pelaksanaan Pemeriksaan , Pengawasan, dan Pengecekan Kesehatan Koperasi dengan	Pelaksanaan Pemeriksaan , Pengawasan, dan Pengecekan Kesehatan Koperasi dengan	Pelaksanaan Pemeriksaan , Pengawasan, dan Pengecekan Kesehatan Koperasi dengan	Pelaksanaan Pemeriksaan , Pengawasan, dan Pengecekan Kesehatan Koperasi dengan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Wilayah Keanggotaan dalam Kabupaten	Wilayah Keanggotaan dalam Kabupaten	Wilayah Keanggotaan dalam Kabupaten	Wilayah Keanggotaan dalam Kabupaten	Wilayah Keanggotaan dalam Kabupaten
Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan terhadap Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Kabupaten	Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan terhadap Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Kabupaten	Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan terhadap Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Kabupaten	Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan terhadap Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Kabupaten	Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan terhadap Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Kabupaten
Fasilitasi Akta Notaris terhadap Koperasi	Fasilitasi Akta Notaris terhadap Koperasi	Fasilitasi Akta Notaris terhadap Koperasi	Fasilitasi Akta Notaris terhadap Koperasi	Fasilitasi Akta Notaris terhadap Koperasi
Pelaksanaan kegiatan Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui kegiatan Perkoperasian	Pelaksanaan kegiatan Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui kegiatan Perkoperasian	Pelaksanaan kegiatan Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui kegiatan Perkoperasian	Pelaksanaan kegiatan Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui kegiatan Perkoperasian	Pelaksanaan kegiatan Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui kegiatan Perkoperasian
Fasilitasi Kemitraan UMKM dan Koperasi	Fasilitasi Kemitraan UMKM dan Koperasi	Fasilitasi Kemitraan UMKM dan Koperasi	Fasilitasi Kemitraan UMKM dan Koperasi	Fasilitasi Kemitraan UMKM dan Koperasi
Pelaksanaan Pendataan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Pelaksanaan Pendataan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Pelaksanaan Pendataan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Pelaksanaan Pendataan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Pelaksanaan Pendataan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Pendataan dan Fasilitasi Perizinan Pendirian Usaha Mikro	Pendataan dan Fasilitasi Perizinan Pendirian Usaha Mikro	Pendataan dan Fasilitasi Perizinan Pendirian Usaha Mikro	Pendataan dan Fasilitasi Perizinan Pendirian Usaha Mikro	Pendataan dan Fasilitasi Perizinan Pendirian Usaha Mikro
Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan Pelaku Usaha melalui Kemitraan	Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan Pelaku Usaha melalui Kemitraan	Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan Pelaku Usaha melalui Kemitraan	Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan Pelaku Usaha melalui Kemitraan	Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan Pelaku Usaha melalui Kemitraan
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual,H	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual,H	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual,H	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual,H	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual,H

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
alal, dan PIRT Usaha Mikro	alal, dan PIRT Usaha Mikro	alal, dan PIRT Usaha Mikro	alal, dan PIRT Usaha Mikro	alal, dan PIRT Usaha Mikro
Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Mikro	Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Mikro	Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Mikro	Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Mikro	Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Mikro
Pelaksanaan Pendamping an Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan /Pencatatan	Pelaksanaan Pendamping an Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan /Pencatatan	Pelaksanaan Pendamping an Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan /Pencatatan	Pelaksanaan Pendamping an Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan /Pencatatan	Pelaksanaan Pendamping an Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan /Pencatatan
Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan terhadap UMKM	Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan terhadap UMKM	Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan terhadap UMKM	Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan terhadap UMKM	Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan terhadap UMKM
Pendataan dan Fasilitasi Usaha Mikro dan Wira Usaha Muda, dalam bertransform asi menjadi Kewirausaha an Matang	Pendataan dan Fasilitasi Usaha Mikro dan Wira Usaha Muda, dalam bertransform asi menjadi Kewirausaha an Matang	Pendataan dan Fasilitasi Usaha Mikro dan Wira Usaha Muda, dalam bertransform asi menjadi Kewirausaha an Matang	Pendataan dan Fasilitasi Usaha Mikro dan Wira Usaha Muda, dalam bertransform asi menjadi Kewirausaha an Matang	Pendataan dan Fasilitasi Usaha Mikro dan Wira Usaha Muda, dalam bertransform asi menjadi Kewirausaha an Matang
Pelaksanaan Pengembang an Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Pelaksanaan Pengembang an Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Pelaksanaan Pengembang an Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Pelaksanaan Pengembang an Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Pelaksanaan Pengembang an Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

3.4 Arah Kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota

ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
(2)	(3)
1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang berintegrasi, akuntabel dan bebas korupsi dengan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, inovasi berkelanjutan, monitoring dan evaluasi yang kuat, serta penguatan SDM dan kelembagaan berbasis digital untuk percepatan	1.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian 1.2. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Keuangan 1.3. Peningkatan kualitas dan akuntabilitas Perencanaan dan Penyelenggaraan

pembangunan daerah.	
2. Memperkuat peran UMK dalam Upaya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan melalui Pelatihan dan Fasilitasi bantuan modal	2.1. Pemberdayaan usaha Mikro yang dilakukan melalui Kemitraan 2.2. Terfasilitasinya Usaha Mikro melalui kegiatan Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik 2.3. Fasilitasi Pendampingan dan Pelatihan Pemahaman dan Pengetahuan Pelaku Usaha serta Peningkatan Kompetensi SDM dan Kewirausahaan 2.4. Peningkatan kualitas pelayanan Usaha Simpan Pinjam 2.5. Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Koperasi 2.6. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Koperasi 2.7. Peningkatan SDM Perkoperasian 2.8. Peningkatan Kualitas Koperasi 2.9. Peningkatan Produktivitas Koperasi
3. Mendorong peningkatan kualitas produk-produk UKM agar dapat menembus pasar global	3.1. Fasilitasi kemudahan Perizinan Usaha 3.2. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) 3.3. Fasilitasi Halal dan PIRT Usaha 3.4. Dilakukannya fasilitasi Inkubasi dan Peningkatan Skala Usaha 3.5. Fasilitasi peningkatan kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumberdaya, serta Desain dan Teknologi 3.6. Peningkatan Citra Produk 3.7. Fasilitasi Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Progul
4. Menciptakan kebijakan kemudahan dalam berinvestasi berbasis digital serta terjaganya stabilitas ekonomi makro	4.1. Fasilitasi Usaha Mikro dalam Pelatihan pemanfaatan aplikasi berbasis digital 4.2. Pelaksanaan Pengendalian Ketersediaan Barang Pokok dan Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 4.3. Pelaksanaan pemantauan harga Bapokting di tingkat Agen dan Pasar Rakyat 4.4. Pelaksanaan Pemantauan dan Pelaporan Stock dan Harga Bapokting melalui Integrasi Sistem Informasi Perdagangan 4.5. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dalam rangka

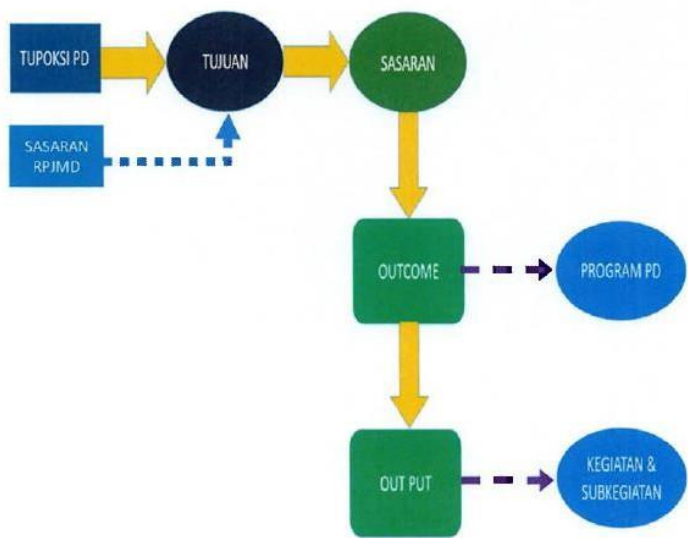
	Stabilitas Harga dan Pasokan Bakpoting 4.6. Fasilitasi peningkatan kualitas Fasilitas Sarana Distribusi Perdagangan 4.7. Peningkatan tertib Niaga dan Mutu Produk 4.8. Peningkatan kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
--	---

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Uraian program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan melalui Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah ini mengacu ke dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berikut ini merupakan kerangka perumusan program/kegiatan/subkegiatan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan
Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra PD



Sumber: Inmen No. 2 Tahun 2025

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penguatan UMK dan Kewirausahaan Lokal	Penguatan UKM dan Kewirausahaan Lokal dan Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Makro yang Terintegrasi dengan Ekonomi Domestik dan Regional				persentase dan stabilitas jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)		
					Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)		
					Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)		
		Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan			Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)		
					Persentase dan stabilitas jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)		
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Dokumen	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
					Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik (laporan)	3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
					Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
					Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan,	3.30.02.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan,	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
					Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik (laporan)	3.30.02.2.01.0002 - Fasilitas pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	
				Terfasilitasinya penerbitan tanda daftar gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
					Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	3.30.02.2.02.0001 - Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
				Terfasilitasinya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	
					Jumlah dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	
					Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Dokumen)	3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	
					Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.03.0001 - Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	
					Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Dokumen)	3.30.02.2.03.0002 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	
					Jumlah dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.03.0003 - Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik	
					Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	3.30.02.2.03.0004 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Persentase peningkatan penerbitan izin usaha minuman beralkohol	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.05 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	
					Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (dokumen)	3.30.02.2.05 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	
					Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.05.0001 - Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	
					Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan	3.30.02.2.05.0002 - Fasilitas Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (dokumen)		
				Persentase pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 (Dokumen)	3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (Laporan)	3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (Laporan)	3.30.02.2.06.0001 - Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 (Dokumen)	3.30.02.2.06.0002 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir	3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	
				Persentase peningkatan penerbitan surat keterangan asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	3.30.02.2.07 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	
					Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	3.30.02.2.07.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi		Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang (Kegiatan)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang (laporan)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Kegiatan fasilitasi	3.30.03.2.01.0003 -	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Sistem Resi Gudang (Kegiatan)	Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota	
					Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang (laporan)	3.30.03.2.01.0004 - Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	
				Terlaksananya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02.0002 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
				Tersedianya barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Kabupaten	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan	3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pasar Rakyat (Laporan)		
					Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3.30.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3.30.04.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
					Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3.30.04.2.01.0003 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
				Terkendalnya harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
				Pesentase peningkatan pengawasan pupuk dan peptisida bersubsidi	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan (Dokumen)	3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (Laporan)	3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan (Dokumen)	3.30.04.2.03.0001 - Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	
					Jumlah Laporan Pengawasan	3.30.04.2.03.0002 -	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor		Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (Laporan)	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
					Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	3.30.04.2.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
				Terselenggaranya Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang	3.30.05.2.01.0002 - Pameran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	Dagang Nasional	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01.0003 - Pameran Dagang Lokal	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
					Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	3.30.05.2.01.0005 - Peningkatan Citra Produk Ekspor	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk		Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Terlaksananya Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Unit)	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
					Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Unit)	3.30.06.2.01.0003 - Penyidikan Metrologi Legal	
			Meningkatnya		Presentase Produk Lokal yang	3.30.07 - PROGRAM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		Difasilitasi / Dilaksanakan (%)	PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
				Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Orang)	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Orang)	3.30.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace,	3.30.07.2.01.0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)		
		Meningkatnya Kontribusi UMKM Terhadap Perekonomian			Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)		
					Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (Persentase)		
					Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%)		
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
				Terfasilitasinya penerbitan izin usaha koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.02.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya izin penerbitan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.02.2.02 - Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor	2.17.02.2.02.0001 - Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
				Terlaksananya proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi		Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
				Terlaksananya Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten		Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01.0003 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
				Meningkatnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Meningkatnya produktivitas Koperasi		Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten	Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)		
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam	2.17.06.2.01.0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
					Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0004 - Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
					Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0006 - Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0007 - Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0008 - Fasilitas Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
					Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
					Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Para Pemangku Kepentingan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan,	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Usaha Mikro (Unit Usaha)	Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah	2.17.07.2.01.0004 -	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
					Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0007 - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0008 - Pemulihan Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0009 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	
					Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0010 - Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0011 - Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0012 - Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
					Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0013 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	
					Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya daya sain UMKM			Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
					Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
				Terlaksananya pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
					Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro	
					Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	2.17.08.2.01.0003 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	
					Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	2.17.08.2.01.0004 - Fasilitas Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01.0005 - Fasilitas Inkubator Usaha Mikro	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
					Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase pemenuhan penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah		2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase tertib administrasi keuangan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
						2.17.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.17.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.17.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Persentase tertib administrasi barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.17.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					(Dokumen)	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.17.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.17.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.17.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					SKPD (Laporan)		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.17.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.17.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Persentase barang milik daerah yang berkategori baik	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.1 Uraian Program

Berdasarkan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan maka dalam 5 (lima) tahun berjalan, uraian-uraian program dan kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.17.01)
2. Program Pelayanan Izin Usaha Koperasi (2.17.02)
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (2.17.03)
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi (2.17.04)
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (2.17.05)
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen (2.17.06)
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) (2.17.07)
8. Program Pengembangan UMKM (2.17.08)
9. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan (3.30.02)
10. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (3.30.03)
11. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting (3.30.04)
12. Program Pengembangan Ekspor (3.30.05)
13. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (3.30.06)
14. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (3.30.07)

4.2 Uraian Kegiatan

Berdasarkan Program-program yang telah dipilih dalam pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan pada kurun waktu 2025-2029 ini, maka uraian kegiatan pada masing-masing program adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Uraian Kegiatan PD

No.	Kode Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan
1.	2.17.02	2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.	2.17.03	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.	2.17.04	2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan

No.	Kode Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan
			Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
4.	2.17.05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
5.	2.17.06	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		3.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		4.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
6.	2.17.07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
		3.02	Penetapan pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengan kewajiban Kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM
		3.03	Dukungan bagi Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah OAP sebagai penyedia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pusat/ Daerah dengan melakukan perjanjian kerjasama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha OAP
		3.04	Fasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha.
		4.02	Pentetapan Pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengan kewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM
		4.03	Dukungan bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP sebagai Penyedia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pusat/ Daerah dengan melakukan Perjanjian Kerjasama Memprioritaskan Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha OAP

No.	Kode Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan
7.	2.17.08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
8.	2.17.09	3.01	Pemberian Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi
		3.02	Penguatan Peran Notaris Pembuat Akta Koperasi
		4.01	Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi
		4.02	Penguatan Peran Notaris Pembuat Akta Koperasi
9.	3.30.02	2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Pasar Rakyat, Pusat Perberlanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
		2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang
		2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
10.	3.30.03	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
		2.02	Pembinaan terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
		3.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
		4.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
11.	3.30.04	2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		2.02	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
		2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
12.	3.30.05	2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
13.	3.30.06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
14.	3.30.07	2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

4.3 Uraian Subkegiatan, Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Insentif

Tabel 4. 3 Tabel Uraian Subkegiatan, Kinerja, Indikator, dan Target 2025-2025

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				5.286.388.753,0 0		7.019.272.555,0 0		7.251.256.006,00		7.460.681.166,00		7.539.977.265,0 0		
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.064.391.153,0 0		5.334.272.555,0 0		5.440.956.006,00		5.549.775.166,00		5.660.770.669,0 0		
Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100	100	5.064.391.153,0 0	100	5.334.272.555,0 0	100	5.440.956.006,00	100	5.549.775.166,00	100	5.660.770.669,0 0	2.17.3.30.0.00.11.0 0 00 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.954.500,00		20.000.000,00		20.000.000,00		12.175.000,00		20.500.000,00		
Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)			0,00 8.954.50		00,00 20.000.0		0,00 20.000.00		0,00 12.175.00		00,00 20.500.0		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	3		3		3		3					
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)													
Persentase pemenuhan penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)			0,00 8.954.50		00,00 20.000.0		0,00 20.000.00		0,00 12.175.00		00,00 20.500.0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	6		6		6		6		6			
Persentase pemenuhan penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)			8.954.500,00		20.000.000,00		20.000.000,00		12.175.000,00		20.500.000,00		
2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.169.300,00		10.000.000,00		10.000.000,00		6.300.000,00		10.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	6	6.169.300,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	6.300.000,00	6	10.500.000,00		
2.17.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				0		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		0		0		0		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.785.200,00		10.000.000,00		10.000.000,00		5.875.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	3	2.785.200,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	5.875.000,00	3	10.000.000,00		
2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.466.962.153,0 0		4.103.686.353,0 0		4.154.525.064,00		4.199.605.145,00		4.255.839.363,0 0		
Persentase tertib administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	41	44	4.466.962.15 3,00	44	4.103.686.35 3,00	44	4.154.525.064 ,00	44	4.199.605.145 ,00	44	4.255.839.36 3,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.458.938.653,00		4.073.686.353,00		4.124.200.064,00		4.175.340.145,00		4.227.114.363,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	41	44	4.458.938.653,00	44	4.073.686.353,00	44	4.124.200.064,00	44	4.175.340.145,00	44	4.227.114.363,00		
2.17.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				8.023.500,00		10.000.000,00		10.325.000,00		11.500.000,00		12.750.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	1	8.023.500,00	1	10.000.000,00	1	10.325.000,00	1	11.500.000,00	1	12.750.000,00		
2.17.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiaian Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		7.830.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	7.830.000,00	1	10.000.000,00		
2.17.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		4.935.000,00		5.975.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Semesteran SKPD														
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	4.935.000,00	1	5.975.000,00		
2.17.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0,00		10.570.400,00		11.645.000,00		12.747.000,00		14.905.000,00		
Persentase tertib administrasi barang milik daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	2	10.570.400,00	2	11.645.000,00	2	12.747.000,00	2	14.905.000,00		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)													
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0		2		2		2		2			
2.17.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		4.967.000,00		5.980.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	4.967.000,00	2	5.980.000,00		
2.17.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		5.570.400,00		6.645.000,00		7.780.000,00		8.925.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0,00	2	5.570.400,00	2	6.645.000,00	2	7.780.000,00	2	8.925.000,00		
2.17.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		65.000.000,00		65.000.000,00		32.500.000,00		65.000.000,00		
Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			0,00		65.000.0 00,00		65.000.00 0,00		32.500.00 0,00		65.000.0 00,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)													
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0		2		2		1		2			
2.17.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		65.000.000,00		65.000.000,00		32.500.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00	1	32.500.000,00	2	65.000.000,00		
2.17.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				111.524.500,00		297.215.802,00		309.355.942,00		206.475.000,00		309.423.285,00		
Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	111.524.500,00	2	297.215.802,00	2	309.355.942,00	2	206.475.000,00	2	309.423.285,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0		1		2		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.548.000,00		10.000.000,00		6.500.000,00		4.695.000,00		5.762.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.548.000,00	1	10.000.000,00	1	6.500.000,00	1	4.695.000,00	1	5.762.000,00		
2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		0		0		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		49.800.000,00		60.000.000,00		30.000.000,00		49.800.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	1	49.800.000,00	2	60.000.000,00	1	30.000.000,00	1	49.800.000,00		
2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24.172.700,00		36.415.802,00		33.855.942,00		28.060.000,00		34.861.285,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	24.172.700,00	2	36.415.802,00	2	33.855.942,00	2	28.060.000,00	2	34.861.285,00		
2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				13.271.800,00		30.000.000,00		30.000.000,00		15.400.000,00		30.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N				
			2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	13.271.800,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	15.400.000,00	2	30.000.000,00						
2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		1.200.000,00		5.000.000,00						
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	1.200.000,00	1	5.000.000,00						
2.17.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				3.100.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		17.120.000,00		24.000.000,00						
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	3.100.000,00	12	24.000.000,00	12	24.000.000,00	12	17.120.000,00	12	24.000.000,00						
2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				69.432.000,00		142.000.000,00		150.000.000,00		110.000.000,00		160.000.000,00						
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	69.432.000,00	12	142.000.000,00	12	150.000.000,00	12	110.000.000,00	12	160.000.000,00						
2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				37.000.000,00		108.800.000,00		54.400.000,00		452.000.000,00		108.800.000,00						
Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	00,00	37.000.0	0,00	108.800.00	0,00	54.400.00	,00	452.000.000	0,00	108.800.00					
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	20															
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)																	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0												4	2	1	4
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		108.800.000,00		54.400.000,00		452.000.000,00		108.800.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	4	108.800.000,00	2	54.400.000,00	1	452.000.000,00	4	108.800.000,00		
2.17.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		0		0		0		0		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	20	12.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.17.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	25.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				243.000.000,00		266.000.000,00		286.000.000,00		266.000.000,00		286.000.000,00		
Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)			243.000.000,00		266.000.000,00		286.000.000,00		266.000.000,00		286.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.17.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				77.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	77.000.000,00	12	100.000.000,00	12	120.000.000,00	12	100.000.000,00	12	120.000.000,00		
2.17.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		0		0		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	165.000.000,00	12	165.000.000,00	12	165.000.000,00	12	165.000.000,00	12	165.000.000,00		
2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				196.950.000,00		463.000.000,00		540.030.000,00		368.273.021,00		600.303.021,00		
Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	15	196.950.00 0,00	16	463.000.00 0,00	18	540.030.000 ,00	20	368.273.021 ,00	22	600.303.02 1,00		
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)													
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	29	29		33		35		36		40			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)													
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)													
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		1		1		1		1			
2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				151.800.000,00		209.000.000,00		209.000.000,00		209.000.000,00		209.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	29	29	151.800.000,00	33	209.000.000,00	35	209.000.000,00	36	209.000.000,00	40	209.000.000,00		
2.17.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.150.000,00		24.000.000,00		26.030.000,00		29.273.021,00		31.303.021,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	15	10.150.000,00	16	24.000.000,00	18	26.030.000,00	20	29.273.021,00	22	31.303.021,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	35.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.17.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		200.000.000,00		275.000.000,00		100.000.000,00		330.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	1	200.000.000,00	1	275.000.000,00	1	100.000.000,00	1	330.000.000,00		
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				0,00		75.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	0	0	0,00	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00	1	150.000.000,00	2.17.3.30.0.00.11.0 00 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		50.000.000,00		65.000.000,00		85.000.000,00		100.000.000,00		
Terfasilitasinya penerbitan izin usaha koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	-	-	0,00	20	50.000.000,00	24	65.000.000,00	28	85.000.000,00	30	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.02.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		50.000.000,00		65.000.000,00		85.000.000,00		100.000.00 0,00		
Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	-	-	0,00	20	50.000.000,00	24	65.000.000,00	28	85.000.000,00	30	100.000.00 0,00		
2.17.02.2.02 - Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		25.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		50.000.0 00,00		
Terfasilitasinya izin penerbitan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	0	0	0,00	20	25.000.000,00	24	35.000.000,00	28	40.000.000,00	30	50.000.0 00,00		
2.17.02.2.02.0001 - Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		25.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		50.000.0 00,00		
Terfasilitasinya Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	0	0	0,00	20	25.000.000,00	24	35.000.000,00	28	40.000.000,00	30	50.000.0 00,00		
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				30.000.000,00		135.000.000,00		185.000.000,00		225.000.000,00		275.000.00 0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	0	5	30.000.000,00	8	135.000.000,00	10	185.000.000,00	12	225.000.000,00	15	275.000.000,00	2.17.3.30.0.00.11.000 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				30.000.000,00		135.000.000,00		185.000.000,00		225.000.000,00		275.000.000,00		
Terlaksananya proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	-	80	30.000.000,00	105	135.000.000,00	110	185.000.000,00	120	225.000.000,00	125	275.000.000,00		
	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	0	0		0		0		0		0			
2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000,00		135.000.000,00		185.000.000,00		225.000.000,00		275.000.000,00		
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	-	80	30.000.000,00	105	135.000.000,00	110	185.000.000,00	120	225.000.000,00	125	275.000.000,00		
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				10.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	48	50	10.000.000,00	55	60.000.000,00	55	70.000.000,00	60	80.000.000,00	65	100.000.000,00	2.17.3.30.0.00.11.0 00 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	18	0	10.000.0 00,00	16	60.000.0 00,00	16	70.000.00 0,00	16	80.000.00 0,00	16	100.000.00 0,00		
	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	18	10											
2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				10.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	18	10	10.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.17.04.2.01.0003 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan				0,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	18	0	0,00	16	60.000.000,00	16	70.000.000,00	16	80.000.000,00	16	100.000.000,00		
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				35.000.000,00		350.000.000,00		375.000.000,00		385.000.000,00		400.000.000,00		
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	0	1	35.000.000,00	3	350.000.000,00	5	375.000.000,00	7	385.000.000,00	10	400.000.000,00	2.17.3.30.0.00.11.0 00 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				35.000.000,00		350.000.000,00		375.000.000,00		385.000.000,00		400.000.000,00				
Meningkatnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	0	50	35.000.000,00	600	350.000.000,00	620	375.000.000,00	650	385.000.000,00	650	400.000.00 0,00				
2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				35.000.000,00		350.000.000,00		375.000.000,00		385.000.000,00		400.000.00 0,00				
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	0	50	35.000.000,00	600	350.000.000,00	620	375.000.000,00	650	385.000.000,00	650	400.000.00 0,00				
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				15.000.000,00		153.000.000,00		156.060.000,00		159.181.200,00		162.364.80 0,00				
Meningkatnya produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	14,75	16	15.000.000,00	17	153.000.000,00	18	156.060.000,00	19	159.181.200,00	20	162.364.80 0,00	2.17.3.30.0.00.11.0 0 00 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000,00		153.000.000,00		156.060.000,00		159.181.200,00		162.364.80 0,00				
Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)			15.000.0 00,00		153.000.00 0,00		156.060.000 ,00		159.181.200 ,00		162.364.80 0,00				
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	-	30				60				60			60		
	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	0	0				5				5			5		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N				
			2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)																	
	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	0	0				40				45					50		50
	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya (Unit Usaha)																	
	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)																	
	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)																	
2.17.06.2.01.0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				15.000.000,00		66.800.000,00		64.060.000,00		64.181.200,00		67.364.800,00						
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	-	30	15.000.000,00	60	66.800.000,00	60	64.060.000,00	60	64.181.200,00	60	67.364.800,00						
2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi				0		0		0		0		0						
Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)			0		0		0		0		0						
2.17.06.2.01.0004 - Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				0,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	0	0	0,00	5	25.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00		
2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				0,00		61.200.000,00		62.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	0	0	0,00	40	61.200.000,00	45	62.000.000,00	50	65.000.000,00	50	65.000.000,00		
2.17.06.2.01.0006 - Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya (Unit Usaha)			0		0		0		0		0		
2.17.06.2.01.0007 - Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)			0		0		0		0		0		
2.17.06.2.01.0008 - Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan /atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0			
Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)			0		0		0		0		0			
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				105.996.500,00		306.000.000,00		312.120.000,00		318.362.400,00		467.112.148,00			
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	2,39	2,5	105.996.50 0,00	2,5	306.000.00 0,00	2,5	312.120.000 ,00	2,5	318.362.400 ,00	2,5	467.112.14 8,00	2.17.3.30.0.00.11.0 00 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2,39	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5				
2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				105.996.500,00		306.000.000,00		312.120.000,00		318.362.400,00		467.112.148,00			
Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	0	0	105.996.50 0,00	60	306.000.00 0,00	60	312.120.000 ,00	60	318.362.400 ,00	60	467.112.14 8,00			
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	0	80		80		60		40		80				
	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	0	10		10		10		10		20				
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	0	20		20		20		20		30				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N				
			2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)																	
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	53	30				60				60					60		80
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)																	
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)																	
	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	106	80				80				85					85		90
	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	0	60				60				50					40		80
2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro				2.000.000,00		20.000.000,00		16.120.000,00		8.362.400,00		25.612.148,00						
Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	0	80	2.000.000,00	80	20.000.000,00	60	16.120.000,00	40	8.362.400,00	80	25.612.148,00						
2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro				2.000.200,00		16.000.000,00		12.000.000,00		8.000.000,00		25.000.000,00						
Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	0	60	2.000.200,00	60	16.000.000,00	50	12.000.000,00	40	8.000.000,00	80	25.000.000,00						
2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				0		0		0		0		0						
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)			0		0		0		0		0						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)			0		0		0		0		0		
2.17.07.2.01.0007 - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil				0,00		80.000.000,00		82.000.000,00		83.000.000,00		95.000.000,00		
Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	0	0	0,00	60	80.000.000,00	60	82.000.000,00	60	83.000.000,00	60	95.000.000,00		
2.17.07.2.01.0008 - Pemulihan Usaha Mikro				0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)			0		0		0		0		0		
2.17.07.2.01.0009 - Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil				1.999.400,00		5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		25.500.000,00		
Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	0	10	1.999.400,00	10	5.000.000,00	10	6.000.000,00	10	7.000.000,00	20	25.500.000,00		
2.17.07.2.01.0010 - Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro				0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)			0		0		0		0		0		
2.17.07.2.01.0011 - Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro				2.000.000,00		30.000.000,00		31.000.000,00		32.000.000,00		50.000.000,00		
Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	0	10	2.000.000,00	10	30.000.000,00	10	31.000.000,00	10	32.000.000,00	15	50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.07.2.01.0012 - Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah				0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)			0		0		0		0		0		
2.17.07.2.01.0013 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik				1.998.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		50.000.000,00		
Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	0	20	1.998.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	25.000.000,00	30	50.000.000,00		
2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro				60.998.800,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		76.000.000,00		
Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	106	80	60.998.800,00	80	65.000.000,00	85	70.000.000,00	85	75.000.000,00	90	76.000.000,00		
2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan				35.000.100,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		120.000.000,00		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	53	30	35.000.100,00	60	70.000.000,00	60	75.000.000,00	60	80.000.000,00	80	120.000.000,00		
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				26.001.100,00		606.000.000,00		612.120.000,00		618.362.400,00		324.729.648,00		
Meningkatnya daya sain UMKM	Proporsi UKM Menjalini Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0	1,8	26.001.100,00	2	606.000.000,00	2	612.120.000,00	2,5	618.362.400,00	3	324.729.648,00	2.17.3.30.0.00.11.0 00 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				26.001.100,00		606.000.000,00		612.120.000,00		618.362.400,00		324.729.648,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	0	60	26.001.100,00	60	606.000.000,00	60	612.120.000,00	60	618.362.400,00	60	324.729.648,00		
	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)													
	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	0	3		5		5		5		5			
	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	0	0		5		5		5		5			
2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro				24.000.500,00		30.000.000,00		32.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	0	60	24.000.500,00	60	30.000.000,00	60	32.000.000,00	60	35.000.000,00	60	35.000.000,00		
2.17.08.2.01.0003 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan				0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)			0		0		0		0		0		
2.17.08.2.01.0004 - Fasilitas Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang				0,00		376.000.000,00		380.120.000,00		383.362.400,00		89.729.648,00		
Terlaksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	0	0	0,00	5	376.000.000,00	5	380.120.000,00	5	383.362.400,00	5	89.729.648,00		
2.17.08.2.01.0005 - Fasilitas Inkubator Usaha Mikro				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	0	0	0,00	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00		
2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				2.000.600,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	0	3	2.000.600,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				185.499.800,00		9.669.800.000,00		10.986.280.000,00		10.518.183.000,00		5.574.737.550,00		
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				10.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00		43.923.000,00		48.315.300,00		
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	70	70	10.000.000,00	70	36.300.000,00	70	39.930.000,00	70	43.923.000,00	70	48.315.300,00	2.17.3.30.0.00.11.00 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan				0		0		0		0		0		
Dokumen	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik (laporan)			0		0		0		0		0		
	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)													
3.30.02.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)			0		0		0		0		0		
3.30.02.2.01.0002 - Fasilitas pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik				0		0		0		0		0		
Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik (laporan)			0		0		0		0		0		
3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang				10.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00		43.923.000,00		48.315.300,00		
Terfasilitasinya penerbitan tanda daftar gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	0	5	10.000.000,00	5	36.300.000,00	5	39.930.000,00	5	43.923.000,00	5	48.315.300,00		
3.30.02.2.02.0001 - Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang				10.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00		43.923.000,00		48.315.300,00		
Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	0	5	10.000.000,00	5	36.300.000,00	5	39.930.000,00	5	43.923.000,00	5	48.315.300,00		
3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri				0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik (Dokumen)			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Dokumen)													
	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik (dokumen)													
	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)													
3.30.02.2.03.0001 - Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik				0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)			0		0		0		0		0		
3.30.02.2.03.0002 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri				0		0		0		0		0		
Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Dokumen)			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.02.2.03.0003 - Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik				0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik (Dokumen)			0		0		0		0		0		
3.30.02.2.03.0004 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik				0		0		0		0		0		
Verifikasi persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik (dokumen)			0		0		0		0		0		
3.30.02.2.04 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri				0		0		0		0		0		
Persentase Peningkatan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba bagi waralaba luar negeri	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik (Dokumen)			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri (Dokumen)														
	Jumlah data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik (dokumen)														
	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri (Dokumen)														
3.30.02.2.04.0001 - Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri				0		0		0		0		0			
Terlaksananya Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri (Dokumen)			0		0		0		0		0			
3.30.02.2.04.0002 - Fasilitas Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri				0		0		0		0		0			
Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri (Dokumen)			0		0		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.02.2.04.0003 - Fasilitas Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik				0		0		0		0		0		
Verifikasi persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik (Dokumen)			0		0		0		0		0		
3.30.02.2.04.0004 - Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik (dokumen)			0		0		0		0		0		
3.30.02.2.05 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat				0		0		0		0		0		
Persentase peningkatan penerbitan izin usaha minuman beralkohol	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (dokumen)			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)													
3.30.02.2.05.0001 - Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C				0		0		0		0		0		
	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)			0		0		0		0		0		
3.30.02.2.05.0002 - Fasilitas Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C				0		0		0		0		0		
	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (dokumen)			0		0		0		0		0		
3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (Laporan)			0		0		0		0		0		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)													
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 (Dokumen)													
3.30.02.2.06.0001 - Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				0		0		0		0		0		
Terlaksanakannya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (Laporan)			0		0		0		0		0		
3.30.02.2.06.0002 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2				0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 (Dokumen)			0		0		0		0		0		
3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)			0		0		0		0		0		
3.30.02.2.07 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)				0		0		0		0		0		
Persentase peningkatan penerbitan surat keterangan asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)			0		0		0		0		0		
3.30.02.2.07.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA				0		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)			0		0		0		0		0		
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				77.500.000,00		7.650.000.000,0 0		9.057.500.000,00		8.472.875.000,00		3.504.136.250,0 0		
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	0	100	77.500.000,00	100	7.650.000.000,0 0	100	9.057.500.000,00	100	8.472.875.000,00	100	3.504.136.250,0 0	2.17.3.30.0.00.11.0 0 00 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				77.500.000,00		7.000.000.000,0 0		8.527.500.000,00		8.017.075.000,00		3.025.546.250,0 0		
Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	0	1	77.500.0 00,00	2	7.000.000.00 0,00	2	8.527.500.000 ,00	2	8.017.075.000 ,00	2	3.025.546.25 0,00		
	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang (laporan)	0	0		3		4		5		4			
	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang (Kegiatan)	0	0		3		4		5		5			
	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				77.500.000,00		6.550.000.000,00		7.927.500.000,00		7.267.075.000,00		2.375.546.250,00		
Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	0	1	77.500.000,00	2	6.550.000.000,00	2	7.927.500.000,00	2	7.267.075.000,00	2	2.375.546.250,00		
3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)			0		0		0		0		0		
3.30.03.2.01.0003 - Pelaksanaan fasilitas terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota				0,00		300.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terselenggaranya kegiatan fasilitas Sistem Resi Gudang	Jumlah Kegiatan fasilitas Sistem Resi Gudang (Kegiatan)	0	0	0,00	3	300.000.000,00	4	400.000.000,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00		
3.30.03.2.01.0004 - Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota				0,00		150.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya informasi terkait lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang (laporan)	0	0	0,00	3	150.000.000,00	4	200.000.000,00	5	250.000.000,00	4	150.000.000,00		
3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				0,00		650.000.000,00		530.000.000,00		455.800.000,00		478.590.000,00		
Terlaksananya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	0	0	0,00	3	650.000.000,00	3	530.000.000,00	3	455.800.000,00	3	478.590.000,00		
3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				0,00		300.000.000,00		265.000.000,00		227.900.000,00		239.295.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	0	0	0,00	3	300.000.000,00	3	265.000.000,00	3	227.900.000,00	3	239.295.000,00		
3.30.03.2.02.0002 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				0,00		350.000.000,00		265.000.000,00		227.900.000,00		239.295.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	0	0	0,00	3	350.000.000,00	3	265.000.000,00	3	227.900.000,00	3	239.295.000,00		
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				58.000.000,00		391.500.000,00		420.150.000,00		451.140.000,00		484.677.750,00		
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	0	10,21	58.000.000,00	10,19	391.500.000,00	10,16	420.150.000,00	10,14	451.140.000,00	10,12	484.677.750,00	2.17.3.30.0.00.11.00 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				25.000.000,00		191.500.000,00		210.150.000,00		230.640.000,00		253.152.750,00		
Tersedianya barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Kabupaten	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)			25.000,00,00		191.500,00,00		210.150,00,00		230.640,00,00		253.152,750,00		
	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	4	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)													
3.30.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)			0		0		0		0		0		
3.30.04.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				0		0		0		0		0		
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)			0		0		0		0		0		
3.30.04.2.01.0003 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				25.000.000,00		191.500.000,00		210.150.000,00		230.640.000,00		253.152.750,00		
Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	4	12	25.000.000,00	12	191.500.000,00	12	210.150.000,00	12	230.640.000,00	12	253.152.750,00		
3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				33.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		220.500.000,00		231.525.000,00		
Terkendalinya harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4	33.000.000,00	4	200.000.000,00	4	210.000.000,00	4	220.500.000,00	4	231.525.000,00		
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)													
3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)			0		0		0		0		0		
3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)			0		0		0		0		0		
3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				33.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		220.500.000,00		231.525.000,00		
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4	33.000.000,00	4	200.000.000,00	4	210.000.000,00	4	220.500.000,00	4	231.525.000,00		
3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pesentase peningkatan pengawasan pupuk dan peptisida bersubsidi	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan (Dokumen)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	-	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (Laporan)													
3.30.04.2.03.0001 - Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				0		0		0		0		0		
Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan (Dokumen)			0		0		0		0		0		
3.30.04.2.03.0002 - Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				0		0		0		0		0		
Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (Laporan)			0		0		0		0		0		
3.30.04.2.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				0,00		675.000.000,00		551.250.000,00		578.812.500,00		607.753.125,00		
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	0	0	0,00	14,11	675.000.000,00	14,37	551.250.000,00	14,64	578.812.500,00	14,91	607.753.125,00	2.17.3.30.0.00.11.0 0 00 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		675.000.000,00		551.250.000,00		578.812.500,00		607.753.125,00		
Terselenggaranya Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	0	0	0,00	2	675.000.000,00	2	551.250.000,00	2	578.812.500,00	2	607.753.125,00		
	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)													
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	0	0		2		2		2		2			
3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional				0,00		250.000.000,00		200.250.000,00		210.262.500,00		220.775.625,00		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	0	0	0,00	2	250.000.000,00	2	200.250.000,00	2	210.262.500,00	2	220.775.625,00		
3.30.05.2.01.0003 - Pameran Dagang Lokal				0,00		150.000.000,00		101.000.000,00		106.050.000,00		111.352.500,00		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	0	0	0,00	2	150.000.000,00	2	101.000.000,00	2	106.050.000,00	2	111.352.500,00		
3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)			0		0		0		0		0		
3.30.05.2.01.0005 - Peningkatan Citra Produk Ekspor				0,00		275.000.000,00		250.000.000,00		262.500.000,00		275.625.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	0	0	0,00	2	275.000.000,00	2	250.000.000,00	2	262.500.000,00	2	275.625.000,00		
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				39.999.800,00		392.000.000,00		366.200.000,00		392.820.000,00		322.102.000,00		
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	9,60	10	39.999.800,00	12	392.000.000,00	12	366.200.000,00	14	392.820.000,00	14	322.102.000,00	2.17.3.30.0.00.11.00 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				39.999.800,00		392.000.000,00		366.200.000,00		392.820.000,00		322.102.000,00		
Terlaksananya Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	258	200	39.999.800,00	200	392.000.000,00	200	366.200.000,00	200	392.820.000,00	200	322.102.000,00		
	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)													
	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Unit)													
3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				39.999.800,00		392.000.000,00		366.200.000,00		392.820.000,00		322.102.000,00		
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	258	200	39.999.800,00	200	392.000.000,00	200	366.200.000,00	200	392.820.000,00	200	322.102.000,00		
3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				0		0		0		0		0		
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)			0		0		0		0		0		
3.30.06.2.01.0003 - Penyidikan Metrologi Legal				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Unit)			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N				
			2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				0,00		525.000.000,00		551.250.000,00		578.612.500,00		607.753.125,00						
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negri	Presentase Produk Lokal yang Difasilitasi / Dilaksanakan (%)	0	0	0,00	15	525.000.000,00	15	551.250.000,00	15	578.612.500,00	15	607.753.125,00	2.17.3.30.0.00.11.0 00 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				0,00		525.000.000,00		551.250.000,00		578.612.500,00		607.753.125,00						
Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Orang)			0,00	0,00	525.000.00		,00 551.250.000		,00 578.612.500		5,00 607.753.12						
	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)																	
	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	0	0										3			3	3	3
3.30.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				0		0		0		0		0						
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Orang)			0		0		0		0		0						
3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		525.000.000,00		551.250.000,00		578.612.500,00		607.753.125,00						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	0	0	0,00	3	525.000.000,00	3	551.250.000,00	3	578.612.500,00	3	607.753.125,00		
3.30.07.2.01.0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)			0		0		0		0		0		

(Sumber: SIPD Renstra, 2025)

4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Mengacu terhadap Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 sebagai puncak acuan dalam melakukan Pembangunan Daerah, maka Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bergerak berdasarkan Misi Kabupaten ke 4 (Empat) yaitu:

“Membangun Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata Yang Tangguh dan Berkeadilan”

Melalui Misi ke 4 (empat) tersebut, diperoleh 2 (dua) sasaran yang dirumuskan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi kewenangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut:

- 1. Penguatan UKM dan Kewirausahaan Lokal
- 2. Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro yang Terintegrasi dengan Ekonomi Domestik dan Regional.

Bertolak pada sasaran RPJMD tersebut, maka dirumuskan Tujuan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu:

“Penguatan UKM dan Kewirausahaan Lokal dan Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Makro yang Terintegrasi dengan Ekonomi Domestik dan Regional”.

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penguatan UKM dan Kewirausahaan Lokal	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan koperasi	Kegiatan: Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	PPD 5 : Penguatan koperasi, usaha mikro dan kecil
		Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjamdan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor	PPD 5 : Penguatan koperasi, usaha mikro dan kecil

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :	
		Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	PPD 5 : Penguatan koperasi, usaha mikro dan kecil
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Sub Kegiatan : Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil, Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro, Penyusunan Basis Data Usaha Mikro, Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
		Meningkatnya daya saing UMKM	Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Sub Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro	
2.	Meningkatnya stabilitas ekonomi makro	Meningkatnya kelancaran distribusi dan	Kegiatan: Menjamin Ketersediaan Barang	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan regional	stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat, Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Gudang Sub Kegiatan : Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
		Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, peningkatan citra produk ekspor	
		Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
		Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Sub Kegiatan : Pelaksanaan Promosi	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
3.	Membangun Infrastruktur yang strategis	Meningkatnya kualitas sarana distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	PPD 9 : Penataan infrastruktur strategis dan terpadu

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	13.57	13.84	14.11	14.37	14.64	14.91
2	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	%	10.23	10.21	10.19	10.16	10.14	10.12
3	Persentase Usaha Kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	%	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
4	Proporsi UKM menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	1.8	1.8	2	2	2.5	3
5	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	%	0.862	0.904	0.946	0.988	1.030	1.317
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	77.84	77.85	77.86	77.87	77.89	77.90

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci PD

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	%	0,862	0,953	1.044	1.135	1.226	1.317
2	Persentase dan stabilitas dan ketersediaan barang kebutuhan pokok	%	10,23	10,21	10,19	10,16	10,14	10,12
3	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB))	%	13,57	13,84	14,11	14,37	14,64	14,91
4	Kontribusi sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	13,57	13,84	14,11	14,37	14,64	14,91
5	Persentase usaha Kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	%	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
6	Proporsi UKM menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	1,8	1,8	2	2	2,5	3
7	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	0	0	1	1	1	1
8	Presentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	1	5	8	10	12	15
9	Presentase Koperasi Aktif	%	50	50	55	55	60	65
10	Presentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	15	16	17	18	19	20
11	Presentase Usaha Kecil yang Bertransformsi dari Informal ke Formal	%	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
12	Pertumbuhan Wirausaha	%	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
13	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	0	70	70	70	70	70
14	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	0	100	100	100	100	100
15	Nilai Ekspor Barang (% PDRB)	%	0	0	14,11	14,37	14,64	14,91
16	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	10	10,5	11	11,5	12	12,5
17	Presentase Produk Lokal yang Difasilitasi / Dilaksanakan	%	0	0	15	15	15	15

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran strategis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 serta sejalan dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Renstra ini menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah selama lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menetapkan tujuan strategis yaitu Penguatan UKM dan Kewirausahaan Lokal dan Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Makro Yang Terintegrasi Dengan Ekonomi Domestik Dan Regional. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam tiga sasaran strategis, yakni: (1) Peningkatan Nilai Tambah Perdagangan; (2) Peningkatan Kontribusi UMKM dalam Perekonomian; dan (3) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Selanjutnya, Renstra ini akan diturunkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2025 hingga 2029, yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahunnya. Dengan demikian, pelaksanaan Renstra bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan perkembangan kondisi daerah dan kebijakan pembangunan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2025–2029, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan rencana, seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dilaksanakan sesuai tujuan, sasaran, indikator, dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra, RPJMD, serta dokumen perencanaan pembangunan terkait;
2. Efektivitas dan efisiensi, pelaksanaan diarahkan untuk mencapai target kinerja dengan penggunaan sumber daya secara efisien, tepat waktu, dan berdaya guna;
3. Koordinasi dan kolaborasi, sinergi antarbidang di internal, kerja sama lintas perangkat daerah, serta kolaborasi dengan pihak eksternal menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan;
4. Akuntabilitas dan transparansi seluruh tahapan pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan serta disampaikan secara terbuka sesuai dengan ketentuan;
5. Pemanfaatan teknologi informasi, optimalisasi penggunaan system informasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas data dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

5.2. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra

Pengendalian dan evaluasi Renstra dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program, kegiatan, serta pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Mekanisme pengendalian dilakukan melalui pemantauan rutin, rapat monitoring, supervisi, serta pelaporan triwulanan dan tahunan yang diselenggarakan dengan evaluasi Renja setiap tahun.

Cakupan pengendalian dan evaluasi meliputi:

1. Capaian indikator tujuan, sasaran, program, dan rencana aksi yang ditetapkan;
2. Identifikasi deviasi antara target dan realisasi serta penyebabnya;
3. Penilaian terhadap pelaksanaan mitigasi risiko strategis dan operasional;
4. Rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya;

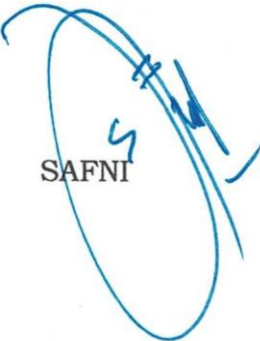
5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk menjamin implementasi Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 berjalan efektif, rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

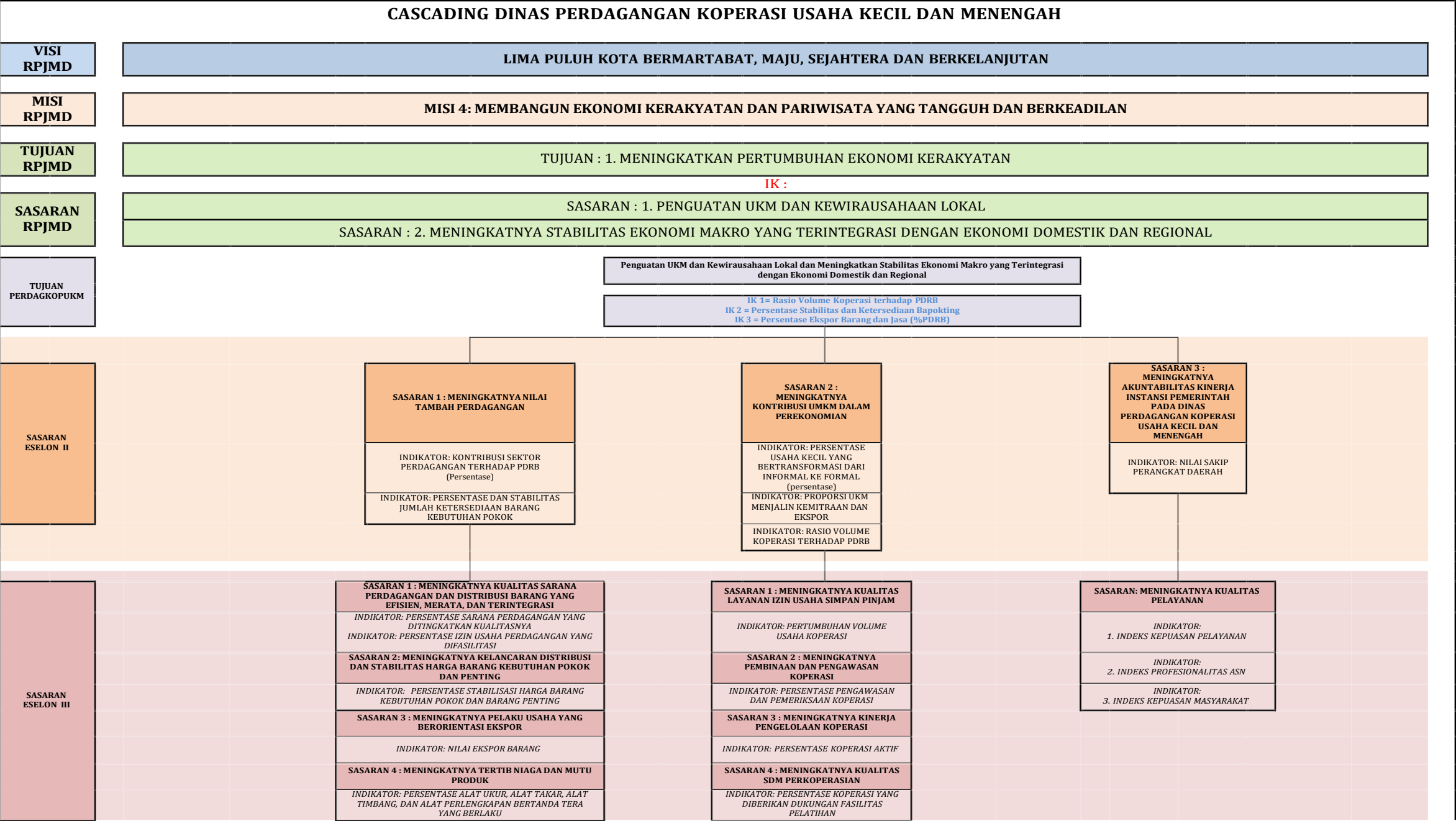
1. Sosialisasi dan internalisasi, menyebarluaskan dokumen Renstra kepada seluruh pegawai agar terbangun pemahaman dan komitmen dalam pelaksanaannya;
2. Penyusunan Renja dan RKA, menerjemahkan program dan kegiatan Renstra ke dalam Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan, melaksanakan seluruh program sesuai jadwal dan alokasi anggaran yang ditetapkan dengan berfokus pada pencapaian target kinerja;
4. Monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan secara berkala terhadap kemajuan pelaksanaan program, mengidentifikasi hambatan, serta menyusun evaluasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan;

Dengan kaidah pelaksanaan, mekanisme pengendalian, serta tindak lanjut tersebut, diharapkan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah: “Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFNI



		SASARAN 5 : MENINGKATNYA PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			SASARAN 5 : MENINGKATNYA LEGALITAS KOPERASI		
		INDIKATOR: PERSENTASE PROMOSI PRODUK LOKAL YANG DIFASILITASI/DILAKSANAKAN			INDIKATOR: PERSENTASE KOPERASI YANG MEMILIKI IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		
					SASARAN 6 : MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS KOPERASI		
					INDIKATOR: PERSENTASE MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS		
					SASARAN 7 : MENINGKATNYA KAPASITAS UMKM YANG TANGGUH DAN MANDIRI		
					INDIKATOR: PERSENTASE USAHA KECIL YANG BERTRANSFORMASI DARI INFORMAL KE FORMAL PERTUMBUHAN WIRUSAHA		
					SASARAN 8 : MENINGKATNYA DAYA SAING UMKM		
					INDIKATOR: PROPORSI UKM MENJALIN KEMITRAAN DAN EKSPOR		

SASARAN ESELON II	SASARAN 1 : MENINGKATNYA NILAI TAMBAH PERDAGANGAN									
	INDIKATOR: KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB (Persentase) INDIKATOR: PERSENTASE DAN STABILITAS JUMLAH KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK									

SASARAN ESELON III	SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI BARANG YANG EFISIEN, MERATA, DAN TERINTEGRASI					SASARAN 2: MENINGKATNYA KELANCARAN DISTRIBUSI DAN STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN PENTING		SASARAN 3: MENINGKATNYA PELAKU USAHA YANG BERORIENTASI EKSPOR		SASARAN 4 : MENINGKATNYA TERTIB NIAGA DAN MUTU PRODUK	SASARAN 5 : MENINGKATNYA PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
	INDIKATOR: PERSENTASE SARANA PERDAGANGAN YANG DITINGKATKAN KUALITASNYA INDIKATOR: PERSENTASE IZIN USAHA PERDAGANGAN YANG DIFASILITASI					INDIKATOR: PERSENTASE STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		INDIKATOR: NILAI EKSPOR BARANG		INDIKATOR: PERSENTASE ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN BERTANDA TERA YANG BERLAKU	INDIKATOR: PERSENTASE PROMOSI PRODUK LOKAL YANG DIFASILITASI/DILAKSANAKAN
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting		Program Pengembangan Ekspor	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	Kegiatan :			Kegiatan :			Kegiatan :		Kegiatan :	Kegiatan :	Kegiatan :
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
	Sub Kegiatan :			Sub Kegiatan :			Sub Kegiatan :		Sub Kegiatan :	Sub Kegiatan :	Sub Kegiatan :
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Pameran Dagang Nasional	Pameran Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Nasional	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
	Rp. 178.468.300			Rp. 24.197.621.250			Rp. 930.398.750		Rp. 881.288.125	Rp. 1.526.577.800	Rp. 1.655.062.500
				Sub Kegiatan :			Kegiatan :		Sub Kegiatan :		
				Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota			Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Pameran Dagang Lokal		
				Rp. 1.700.000.000			Rp. 1.082.195.000		Rp. 468.402.500		
				Sub Kegiatan :			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Sub Kegiatan :		
				Identifikasi terhadap lembaga dan Komoditas Potensial Sistem Resi Gudang di wilayah Kabupaten/Kota			Rp. 922.428.800		Peningkatan Citra Produk Ekspor		

		Rp. 750.000.000		Rp. 1.603.125.000			
SASARAN ESELON II	SASARAN 2 : MENINGKATNYA KONTRIBUSI UMKM DALAM PEREKONOMIAN						
	INDIKATOR: PERSENTASE USAHA KECIL YANG BERTRANSFORMASI DARI INFORMAL KE FORMAL (persentase) NDIKATOR: PROPORSI UKM MENJALIN KEMITRAAN DAN EKSPOR INDIKATOR: RASIO VOLUME KOPERASI TERHADAP PDRB						
SASARAN ESELON III	SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	SASARAN 2 : MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI		SASARAN 4 : MENINGKATNYA KUALITAS SDM PERKOPERASIAN	SASARAN 5 : MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN KOPERASI	SASARAN 7 : MENINGKATNYA KAPASITAS UMKM YANG TANGGUH DAN MANDIRI	SASARAN 8 : MENINGKATNYA DAYA SAING UMKM
	INDIKATOR: PERTUMBUHAN VOLUME USAHA KOPERASI	INDIKATOR: PERSENTASE PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		INDIKATOR: PERSENTASE KOPERASI YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITAS PELATIHAN	INDIKATOR: PERSENTASE KOPERASI AKTIF	INDIKATOR: PERSENTASE USAHA KECIL YANG BERTRANSFORMASI DARI INFORMAL KE FORMAL PERTUMBUHAN WIRUSAHA	INDIKATOR: PROPORSI UKM MENJALIN KEMITRAAN DAN EKSPOR
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pengembangan UMKM
	Kegiatan :	Kegiatan :	Kegiatan :	Kegiatan :	Kegiatan :	Kegiatan :	Kegiatan :
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
	Sub Kegiatan :	Sub Kegiatan :	Sub Kegiatan :	Sub Kegiatan :	Sub Kegiatan :	Sub Kegiatan :	Sub Kegiatan :
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjaman Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Pengembangan Usaha Mikro
	Rp. 300.000.000	Rp. 860.776.000	Rp. 16.200.000	Rp. 1.805.000.000	Rp. 277.406.000	Rp. 72.094.548	Rp. 176.200.500
	Kegiatan :		Sub Kegiatan :		Sub Kegiatan :	Sub Kegiatan :	Sub Kegiatan :
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan		Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
Sub Kegiatan :		Rp. 310.000.000		Rp. 115.000.000	Rp. 63.000.200	Rp. 1.229.212.048	

<i>Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>
Rp. 150.000.000

Sub Kegiatan :
<i>Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i>
Rp. 253.200.000

Sub Kegiatan :
<i>Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil</i>
Rp. 340.000.000
Sub Kegiatan :
<i>Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil</i>
Rp. 45.499.400
Sub Kegiatan :
<i>Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro</i>
Rp. 145.000.000
Sub Kegiatan :
<i>Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik</i>
Rp. 116.998.000
Sub Kegiatan :
<i>Penyusunan Basis Data Usaha Mikro</i>
Rp. 392.998.800
Sub Kegiatan :
<i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan</i>
Rp. 380.000.100

Sub Kegiatan :
<i>Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro</i>
Rp. 600.000.000
Sub Kegiatan :
<i>Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi</i>
Rp. 202.000.600

SASARAN ESELON II	SASARAN 3 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH													
	INDIKATOR: NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH													
SASARAN ESELON III	SASARAN: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN													
	INDEKS KUALITAS PERENCANAAN													
	INDEKS PROFESIONALITAS ASN													
	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT													
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													
Kegiatan :			Kegiatan :			Kegiatan :			Kegiatan :			Kegiatan :		
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan :			Sub Kegiatan :			Sub Kegiatan :			Sub Kegiatan :			Sub Kegiatan :		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		

Rp. 42.969.300	Rp. 25.504.324.613	Rp. 20.947.000	Rp. 1.096.750.000	Rp. 29.505.000	Rp. 724.000.000	Rp. 227.500.000
Sub Kegiatan :	Sub Kegiatan :	Sub Kegiatan :	Sub Kegiatan :	Sub Kegiatan :	Sub Kegiatan :	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Rp. 38.660.200	Rp. 52.598.500	Rp. 28.920.400	Rp. 183.226.042	Rp. 189.600.000	Rp. 12.000.000	
Kegiatan :	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 37.830.000		Rp. 940.000.000	Rp. 183.740.729	Rp. 25.000.000	
Sub Kegiatan :	Sub Kegiatan :		Sub Kegiatan :	Sub Kegiatan :		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Rp. 5.500.000	Rp. 30.910.000		Rp. 120.000.000	Rp. 128.531.900		
Sub Kegiatan :				Sub Kegiatan :		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Rp. 589.920.000				Rp. 16.200.900		
Sub Kegiatan :				Sub Kegiatan :		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Rp. 971.496.000				Rp. 97.040.000		
				Sub Kegiatan :		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
				Rp. 658.643.000		

